

# RENSTRA

## RENCANA STRATEGIS

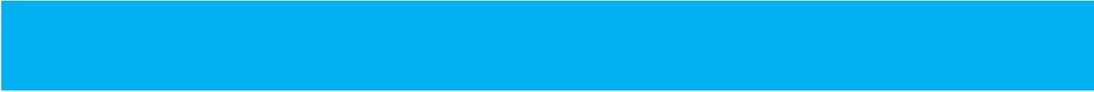
### Komoditi Unggulan Perkebunan



### Komoditi Andalan Perkebunan & Komoditi Potensial Perkebunan



**DINAS PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**TAHUN 2021-2026**



# **RENSTRA**

## **RENCANA STRATEGIS**

**DINAS PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**TAHUN 2021-2026**



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesainya penyusunan “Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026”.

Rencana Strategis ini secara garis besar mengupas tentang Isu-Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, serta Pendanaan Indikatif pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Selanjutnya terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada kami dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis yang memuat kebijaksanaan makro diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan yang tentunya akan disesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat ini.

Semoga Rencana Strategis ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya bagi Pembangunan Sub Sektor Perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, saran, kritik dan arahan yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan dalam rangka perbaikan Perubahan Rencana Strategis ini.

Tenggarong, September 2021

Kepala Dinas Perkebunan  
Kabupaten Kutai Kartanegara,



**H. H. Muhammad Taufik**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670625 199203 1 007

## **TIM PENYUSUN**

### **TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026**

- Penanggung Jawab : **Ir. H. Muhammad Taufik**  
(Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara)
- Ketua : **Hamdani, SE, M.Si**  
(Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara)
- Sekretaris : **Dayang Eva Srie D., S.Hut**  
(Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Dan Keuangan Disbun)
- Anggota : **1. Abdul Samad, SP, MP**  
(Kepala Bidang Usaha Dan Penyuluhan Dinas Perkebunan)
- 2. Ir. Syahrianto, MM**  
(Kepala Bidang Perlindungan Dinas Perkebunan)
- 3. Ir.Suryadi**  
(Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Dinas Perkebunan)
- 4. Rudiyanto Hamli, SP**  
(Kepala Seksi Pengembangan Areal Dinas Perkebunan)
- 5. Yuli Darmayani, SE**  
(Kepala Sub Bagian Umum Dan Ketatalaksanaan Disbun)
- 6. Kuntari, S.Sos**  
(Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Perkebunan)
- 7. John Laurens Barus, SE**  
(Analisis Perencanaan Anggaran Dinas Perkebunan)
- 8. Deni Hersandi, SH**  
(Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan)
- 9. Sukatmi, SP**  
(Analisis Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Perkebunan)
- 10. Rusmansyah Putra**  
(Pengadministrasi Perencanaan & Prog. Dinas Perkebunan)

Diterbitkan Oleh :



**DINAS PERKEBUNAN**

**Kabupaten Kutai Kartanegara Jl. Muso Bin Salim No. 12-13 Tenggarong**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
TIM PENYUSUN .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vi
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud Dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN .....	6
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan .....	6
2.2. Sumber Daya Dinas Perkebunan .....	9
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan .....	13
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perkebunan.....	24
III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN .....	25
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan.....	25
3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	32
3.3. Telaahan RENSTRA Kementerian Dan RENSTRA Provinsi .....	40
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	49
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	56
IV. TUJUAN DAN SASARAN .....	60
4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan .....	60
V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	64
VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	68
VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	80
VIII. PENUTUP .....	86

## **DAFTAR TABEL**

Tabel T-C.22.1.1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan .....	9
Tabel T-C.22.1.2.	Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Esselon .....	9
Tabel T-C.22.1.3.	Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan .....	10
Tabel T-C.22.1.4.	Tenaga Harian Lepas (THL) .....	10
Tabel T-C.22.2.1.	Aset Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara .....	11
Tabel T-C.22.2.2	Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan .....	11
Tabel T-C.22.3.	Unit Usaha Dinas Perkebunan .....	13
Tabel T-C.23.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dari Tahun 2017 s/d 2021 .....	16
Tabel T-C.24.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dari Tahun 2017 s/d 2021.....	22
Tabel 3.1.1.	Produktivitas Komoditi Perkebunan Rakyat Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020.....	25
Tabel 3.1.2.	Realisasi Tanam Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 .....	28
Tabel 3.1.3.	Harga Pasar Rata-Rata Komoditi Perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020.....	30
Tabel 3.1.4.	Pemetaan Permasalahan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.....	31
Tabel 3.2.1.	Indikator Tujuan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 Bagi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara .....	35
Tabel 3.2.2.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 Pada Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 .....	36
Tabel 3.2.3.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan, Urusan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 Bagi RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.....	36
Tabel 3.2.4.	Proyek Strategis Pembangunan Daerah Bagi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 .....	37
Tabel 3.2.5.	Kawasan Unggulan Komoditas Perkebunan.....	38

## **Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

Tabel 3.2.6.	Kawasan Andalan Komoditas Perkebunan.....	39
Tabel 3.2.7.	Kawasan Potensial Komoditas Perkebunan .....	40
Tabel 3.3.1.	Tujuan, Sasaran dan Indikator serta Target Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.....	46
Tabel 3.3.2.	Sasaran, Strategi, & Kebijakan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 .....	48
Tabel 3.4.1.	Sistem dan Fungsi Perkotaan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.....	53
Tabel 3.4.2.	Klasifikasi Pola Ruang Wilayah Kabupaten .....	56
Tabel T-C.25	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 .....	62
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	65
Tabel 5.2.	Kondisi Eksisting Kawasan Unggulan Komoditas Perkebunan Tahun 2020 .....	66
Tabel 5.3.	Kondisi Eksisting Kawasan Andalan Komoditas Perkebunan Tahun 2010 .....	67
Tabel 5.4.	Kondisi Eksisting Kawasan Potensial Komoditas Perkebunan Tahun 2010 .....	67
Tabel 6.1.	Sebaran Rencana Calon Lokasi Pembangunan Embung dan Jalan Produksi Perkebunan Tahun 2022 – 2026 .....	70
Tabel 6.2.	Rencana Sumber Pendanaan Pembangunan Embung dan Jalan Produksi Perkebunan Tahun 2022 – 2026 .....	71
Tabel 6.3.	Sebaran Rencana Calon Lokasi Pembentukan Badan Usaha Milik Petani Tahun 2022-2026 .....	71
Tabel 6.4.	Sebaran Rencana Calon Lokasi Pembinaan Pekebun Milenial Unggul .....	72
Tabel 6.5.	Sebaran Rencana Calon Lokasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perkebunan .....	72
Tabel T-C.27	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 .....	73
Tabel T-C.28	Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara .....	81

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1.1.	Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.....	8
Gambar 4.1.	Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 .....	61

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Renstra Perangkat Daerah merupakan pelaksanaan pembangunan daerah dalam upaya mencapai daya guna dan hasil guna dibutuhkan sinkronisasi antara pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dengan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut maka daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rencana kinerja daerah sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan dan menjadi pedoman rencana kerja Perangkat Daerah. Rencana kinerja Perangkat Daerah tersusun dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah mempunyai Fungsi untuk memahami arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Renstra Dinas Perkebunan menjadi landasan perencanaan kegiatan pada bidang Ekonomi dan Program Pembangunan Perkebunan untuk mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi berdasarkan bidang terkait untuk mengantisipasi perkembangan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Adapun keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra Kementerian, Renstra Provinsi dan Renja Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan merupakan implementasi dari janji Kepala Daerah mengenai program dan kegiatan pembangunan yang diprioritaskan. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah serta rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman

pada RPJMD yang bersifat indikatif, serta memiliki keterkaitan dalam menentukan visi dan misi yang ditetapkan. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi, sehingga dapat menunjang visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Program dan kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah harus berpedoman pada program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah. Maka antara RPJMD, Renstra Kementerian, Renstra Provinsi, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dan saling mendukung.

Sementara alasan dilakukannya penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2021-2026 sendiri sehubungan dengan adanya penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, dimana tahapan penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2021-2026 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2021-2026 mengacu pada Rancangan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Dimana Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Perkebunan disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2021-2026 meliputi : Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah, Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah, Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Renstra sekurang-kurangnya memuat sistematika sebagai berikut : pendahuluan, gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan serta Penutup.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varitas Tanaman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Pembenihan Tanaman;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Penyusunan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;

## **Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

20. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor 251/Kpts/RC.020/7/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
25. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perkebunan;
26. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 ini dimaksudkan untuk :

- a) Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di Lingkungan Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat.
- b) Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c) Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam urusan perkebunan, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 adalah :

- a) Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Tahun 2021 dan Tahun 2022.
- b) Memberikan arahan dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Renstra ini digunakan sebagai instrumen perencana, pengendali, pengarah dan sekaligus berfungsi sebagai pengukur keberhasilan kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara secara operasional, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

**Bab I      Pendahuluan**, berisi tentang :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II      Gambaran Pelayanan Dinas Perkebunan**, berisi tentang :

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan
- 2.2. Sumber Daya Dinas Perkebunan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perkebunan

**BAB III     Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Dinas Perkebunan**, berisi tentang :

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan RENSTRA Kementerian Dan RENSTRA Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV     Tujuan Dan Sasaran**, berisi tentang :

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan

**BAB V      Strategi dan Arah Kebijakan**

**BAB VI     Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

**BAB VII    Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

**BAB VIII   Penutup**

## II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

### 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN GAMBARAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Unsur Pemerintahan dibidang Perkebunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai **Tugas Pokok** membantu Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan **Tugas Pembantuan** di Bidang Perkebunan. Dalam pelaksanaannya Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai **fungsi** sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Perkebunan.
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perkebunan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perkebunan.
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Perkebunan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka diperlukan suatu wadah/tempat organisasi, berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 55 Tahun 2016 Tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perkebunan. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
  - a. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
  - b. Sub Bagian Kepegawaian
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
3. Bidang Pengembangan dan Perbenihan :
  - a. Seksi Penyiapan dan Pemanfaatan Lahan
  - b. Seksi Pengembangan Areal
  - c. Seksi Perbenihan
4. Bidang Produksi :
  - a. Seksi Teknologi dan Budidaya
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana

- c. Seksi Alat dan Mesin
- 5. Bidang Usaha dan Penyuluhan :
  - a. Seksi Pembinaan dan Gangguan Usaha
  - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil
  - c. Seksi Penyuluhan
- 6. Bidang Perlindungan :
  - a. Seksi Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
  - b. Seksi Pengendalian Lingkungan
  - c. Seksi Sarana Perlindungan

Dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional sektor Perkebunan yang meliputi 18 Kecamatan, sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 96 Tahun 2016 Tanggal 26 Oktober 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai 21 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perkebunan yaitu :

1. UPTD Perbenihan Kebun Dinas Dan Pengolahan Hasil
2. UPTD Proteksi Tanaman Dan Laboratorium Hayati
3. UPTD Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun
4. UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Tenggarong
5. UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Loa Kulu
6. UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Loa Janan
7. UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Tenggarong Seberang
8. UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Sebulu
9. UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Muara Kaman
10. UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Samboja
11. UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Muara Jawa
12. UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Sanga-Sanga
13. UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Anggana
14. UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Muara Badak
15. UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Marang Kayu
16. UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Kota Bangun
17. UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Muara Wis
18. UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Muara Muntai
19. UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Kenohan
20. UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Kembang Janggut
21. UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Tabang



**2.2. SUMBER DAYA DINAS PERKEBUNAN**

**2.2.1. Sumber Daya Manusia Dinas Perkebunan**

Dalam melaksanakan Pembangunan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian Lepas (THL). Hingga tahun 2021 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebanyak 177 orang, sedangkan jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) adalah sebanyak 69 orang, dengan rincian sebagai berikut :

**1) Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

**Tabel T-C.22.1.1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan**

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	IV/C	1 Orang	0 Orang	1 Orang
2	IV/B	2 Orang	0 Orang	2 Orang
3	IV/A	5 Orang	6 Orang	11 Orang
4	III/D	23 Orang	17 Orang	40 Orang
5	III/C	8 Orang	7 Orang	15 Orang
6	III/B	3 Orang	3 Orang	6 Orang
7	III/A	5 Orang	5 Orang	10 Orang
8	II/D	44 Orang	14 Orang	58 Orang
9	II/C	15 Orang	7 Orang	22 Orang
10	II/B	7 Orang	0 Orang	7 Orang
11	II/A	0 Orang	1 Orang	1 Orang
12	I/D	4 Orang	0 Orang	4 Orang
13	I/C	0 Orang	0 Orang	0 Orang
14	I/B	0 Orang	0 Orang	0 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>117 Orang</b>	<b>60 Orang</b>	<b>177 Orang</b>

*Sumber Data : Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (2021)*

**Tabel T-C.22.1.2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Esselon**

No.	Esselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Esselon II/B	1 Orang	0 Orang	1 Orang
2	Esselon III/A	1 Orang	0 Orang	1 Orang
3	Esselon III/B	4 Orang	0 Orang	4 Orang
4	Esselon IV/A	15 Orang	11 Orang	26 Orang
5	Esselon IV/B	11 Orang	9 Orang	20 Orang
6	Non Esselon	86 Orang	39 Orang	125 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>118 Orang</b>	<b>59 Orang</b>	<b>177 Orang</b>

*Sumber Data : Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (2021)*

**Tabel T-C.22.1.3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan**

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	SD	3 Orang	0 Orang	3 Orang
2	SLTP	1 Orang	0 Orang	1 Orang
3	SLTA	68 Orang	26 Orang	94 Orang
4	DIPLOMA 1	1 Orang	0 Orang	1 Orang
5	DIPLOMA 1	1 Orang	0 Orang	1 Orang
6	DIPLOMA 1	2 Orang	1 Orang	3 Orang
7	SARJANA (S 1)	33 Orang	23 Orang	56 Orang
8	PASCA SARJANA (S2)	8 Orang	10 Orang	18 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>117 Orang</b>	<b>60 Orang</b>	<b>177 Orang</b>

*Sumber Data : Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (2021)*

**2) Tenaga Harian Lepas (THL)**

**Tabel T-C.22.1.4. Tenaga Harian Lepas (THL)**

No.	Keterangan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Tenaga Pendukung Pengetikan Komputer	8 Orang	8 Orang	16 Orang
2	Tenaga Pendukung Konseptor	1 Orang	1 Orang	2 Orang
3	Pelayanan Administrasi Pimpinan (Portir)	2 Orang	1 Orang	3 Orang
4	Tenaga Pendukung Administrasi	12 Orang	13 Orang	25 Orang
5	Tenaga Pendukung Pelayanan Tamu	0 Orang	1 Orang	1 Orang
6	Tenaga Pendukung Pengantar Surat	0 Orang	0 Orang	0 Orang
7	Tenaga Kebersihan	5 Orang	0 Orang	5 Orang
8	Tenaga Sopir	0 Orang	0 Orang	0 Orang
9	Tenaga Penjaga Kantor	15 Orang	0 Orang	15 Orang
10	Tenaga Pelayanan Perbekalan	1 Orang	0 Orang	1 Orang
11	Tenaga Pendukung Petugas Lapangan	1 Orang	0 Orang	1 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>45 Orang</b>	<b>24 Orang</b>	<b>69 Orang</b>

*Sumber Data : Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (2021)*

**2.2.2. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana perkantoran maupun lapangan merupakan suatu kebutuhan penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan. Kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana akan menentukan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sektor perkebunan, baik dari sisi administrasi maupun lapangan

## **Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

yang erat kaitannya langsung dengan petani perkebunan. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Perkebunan berasal dari anggaran APBD Tingkat I, APBD Tingkat II maupun APBN, dimana dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel T-C.22.2.1. Aset Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

No.	Uraian	Jumlah	Nilai
1	Perkebunan Lain-lain	49.826,24 Ha	Rp. 1.461.290.340,-
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	33.486 Ha	Rp. 3.439.550.000,-
3	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	3.360,375 Ha	Rp. 156.783.130,-

*Sumber Data : Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (2021)*

**Tabel T-C.22.2.2 Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan**

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan Roda 4	9 Unit	
2	Kendaraan Roda 2	94 Unit	
3	AC Split	28 Unit	
4	AC Unit	18 Unit	
5	Alat Dapur Lainnya	24 Unit	
6	Alat Dapur Lainnya	10 Unit	
7	Alat Dapur Lainnya	24 Unit	
8	Alat Dapur Lainnya	24 Unit	
9	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	19 Unit	
10	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	12 Unit	
11	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	15 Unit	
12	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	7 Unit	
13	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	4 Unit	
14	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	2 Unit	
15	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	6 Unit	
16	Alat Penghancur Kertas	9 Unit	
17	Alat Rumah Tangga Lain-lain	10 Unit	
18	Amplifier	1 Unit	
19	Camera Electronic	10 Unit	
20	Camera Film	19 Unit	
21	Camera Video	24 Unit	
22	CCTV	17 Unit	
23	Digital	21 Unit	
24	Digital Audio Storage System	6 Unit	
25	Digitizer	1 Unit	
26	Disk Pack	17 Unit	
27	Dispenser	21 Unit	
28	Electric Generating Set Lain-lain	1 Unit	
29	External	4 Unit	
30	Facsimile	2 Unit	
31	Filling Besi/Metal	22 Unit	
32	Fire Hose (Selang Pemadam Kebakaran)	4 Unit	
33	Global Positioning System	50 Unit	
34	Gorden	4 Unit	
35	Handy Cam	9 Unit	
36	Hard Disk	62 Unit	

**Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
37	Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain	1 Unit	
38	Keyboard	2 Unit	
39	Kipas Angin	18 Unit	
40	Kompas	9 Unit	
41	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	140 Unit	
42	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	6 Unit	
43	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	23 Unit	
44	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15 Unit	
45	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	25 Unit	
46	Kursi Lipat	607 Unit	
47	Kursi Rapat	60 Unit	
48	Kursi Tamu	17 Unit	
49	Lap Top	16 Unit	
50	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	26 Unit	
51	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	2 Unit	
52	Lemari Buku untuk Perpustakaan	2 Unit	
53	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	5 Unit	
54	Lemari Es	5 Unit	
55	Lemari Kayu	33 Unit	
56	Meja Biro	60 Unit	
57	Meja Kayu/Rotan	53 Unit	
58	Meja Kerja	26 Unit	
59	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	22 Unit	
60	Meja Komputer	12 Unit	
61	Meja Resepsionis	6 Unit	
62	Meja Rapat	33 Unit	
63	Memori Programmer	4 Unit	
64	Mesin Absensi	29 Unit	
65	Mesin Calculator	7 Unit	
66	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	4 Unit	
67	Mesin Hitung/Jumlah Lain-lain	3 Unit	
68	Mesin Ketik Elektronik	6 Unit	
69	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	21 Unit	
70	Mesin Penghisap Debu	2 Unit	
71	Mesin Potong Rumput	9 Unit	
72	Microphone/Wireless Mic	15 Unit	
73	Monitor	5 Unit	
74	Note Book	115 Unit	
75	Overhead Projektor	4 Unit	
76	P.C Unit	65 Unit	
77	Papan Nama Instansi	19 Unit	
78	Penyemprot Mesin (Power Spayer)	1 Unit	
79	Peralatan Jaringan Lain-lain	3 Unit	
80	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	2 Unit	
81	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	22 Unit	
82	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	2 Unit	
83	Perkakas Bengkel Kerja Lain-lain	2 Unit	
84	Pesawat Telephone	8 Unit	
85	Plotter	3 Unit	
86	Printer	171 Unit	
87	Proyektor + Attachment	2 Unit	

## Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
88	Scanner	4 Unit	
89	Sepeda Motor	94 Unit	
90	Server	3 Unit	
91	Sofa	32 Unit	
92	Sound System	7 Unit	
93	Stabilisator	7 Unit	
94	Staion Wagon	8 Unit	
95	Suction Hose ( Selang Hisap )	3 Unit	
96	Tabung Gas	1 Unit	
97	Tabung Pemadam Kebakaran (APAR)	9 Unit	
98	Tangga Alumunium	4 Unit	
99	Televisi	22 Unit	
100	Trafo Stater	1 Unit	
101	Unintemuptible Power Supply (UPS)	83 Unit	
102	White Board	5 Unit	
103	Wireless	13 Unit	
<b>Total</b>		<b>2.607 Unit</b>	

Sumber Data : Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (2021)

### 2.2.3. Unit Usaha Dinas Perkebunan

Hingga tahun 2021 Dinas Perkebunan telah memiliki Kebun Dinas seluas 48,6 Ha yang tersebar di 3 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel T-C.22.3. Unit Usaha Dinas Perkebunan**

No.	Uraian	Luas		Komoditi
		Lahan	Tanaman	
1	Kebun Dinas Di Kecamatan Tenggarong Kelurahan Bukit Biru	13,6 Ha	1 Ha	Lada
2	Kebun Dinas Di Kecamatan Tenggarong Kelurahan Loa Ipuh Darat	22 Ha	12 Ha	Kelapa Sawit
3	Kebun Dinas Di Kecamatan Loa Kulu	9 Ha	3 Ha	Kelapa Sawit
4	Kebun Dinas Di Kecamatan Kembang Janggut	4 Ha	3,5 Ha	Kelapa Sawit
<b>Jumlah</b>		<b>48,6 Ha</b>	<b>19,5 Ha</b>	

Sumber Data : Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (2021)

## 2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN

### 2.3.1. Capaian Indikator Kinerja

Akuntabilitas kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Dinas

## **Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Analisis kinerja pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Renstra Tahun 2016 s/d 2021 dihitung dengan cara membandingkan antara capaian kinerja pelayanan dengan perjanjian kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan OPD. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dalam mendukung pencapaian Misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 yaitu Misi ke-1, Misi ke-2 dan Misi ke-4, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara memformulasikan sasaran dan indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan, dengan indikator kinerja : Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan.
2. Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan, dengan indikator kinerja : Persentase Penurunan Pekebun Miskin.
3. Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan, dengan indikator kinerja : Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan.

Dari 3 (tiga) indikator kinerja tersebut, yang terus mengalami kenaikan adalah Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan, walaupun pada akhir periode Renstra yaitu Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 77 (BB). Sementara untuk Indikator Persentase Penurunan Pekebun Miskin hanya dapat dilaksanakan pada Tahun 2020, sedangkan pada Tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan dan Tahun 2021 tidak dapat dianggarkan. Sedangkan untuk Indikator Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan kecenderungan mengalami penurunan terlebih pada Tahun 2020 dan 2021 yang diakibatkan oleh dampak wabah Covid 19.

Capaian indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan didukung oleh 8 (delapan) indikator program yaitu : Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik, Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN, Rata-rata Nila SKP Seluruh ASN Dinas Perkebunan, Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA, Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset, serta Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit. Dimana dari semua indikator program tersebut semua mencapai realisasi 100%, hal ini menunjukkan adanya perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Capaian Indikator Persentase Penurunan Pekebun Miskin didukung oleh 1 (satu) indikator program yaitu : Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapat Bantuan, dimana capaian 100% hanya dapat dicapai pada Tahun 2020, sedangkan pada Tahun 2019 tidak dapat melaksanakan kegiatan dan Tahun 2021 terkendala keterbatasan anggaran.

Sementara Capaian indikator kinerja Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan didukung oleh 5 (lima) indikator program yaitu : Luas Areal Komoditi Perkebunan, Jumlah

## **Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

Petani Pekebun, Produksi Komoditi Perkebunan, PAD Kebun Dinas Perkebunan dan Harga Pasar Komoditi Perkebunan. Dimana untuk capaian Luas Areal Komoditi Perkebunan hanya dicapai oleh komoditi kelapa sawit baik rakyat maupun PBS, sedangkan 6 (enam) komoditi lain terus mengalami penurunan, hal ini terjadi disebabkan oleh banyaknya alih fungsi lahan. Capaian Jumlah Petani Pekebun mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh menurunnya minat petani berusaha di sub sektor perkebunan dan terjadinya penurunan luas lahan yang diusahakan. Kemudian capaian Produksi Komoditi Perkebunan untuk komoditi kelapa sawit sempat mengalami penurunan pada Tahun 2019 disebabkan karena rendahnya harga pasar kelapa sawit, namun pada periode Tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya harga pasar kelapa sawit, sedangkan untuk 6 (enam) komoditi lain terus mengalami penurunan, hal ini sebagian besar disebabkan oleh alih fungsi lahan dan banyaknya tanaman tua dan tanaman rusak. Sedangkan untuk capaian PAD Kebun Dinas Perkebunan mengalami peningkatan signifikan pada Tahun 2021, hal ini terjadi disebabkan oleh tingginya permintaan bibit kelapa sawit yang ada di Kebun Dinas Perkebunan. Sementara capaian Harga Pasar Komoditi Perkebunan terus mengalami peningkatan untuk semua komoditi perkebunan khususnya pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, hal ini menggambarkan adanya perbaikan mutu produk dan tingginya permintaan pasar terhadap komoditi perkebunan. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dari Tahun 2017 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dari Tahun 2017 s/d 2021

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
<b>I</b>	<b>Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan (Nilai)</b>				<b>65 (B)</b>	<b>68 (B)</b>	<b>72 (BB)</b>	<b>76 (BB)</b>	<b>81 (A)</b>	<b>67 (B)</b>	<b>69 (B)</b>	<b>79 (BB)</b>	<b>79 (BB)</b>	<b>77 (BB)</b>	<b>103%</b>	<b>101%</b>	<b>109%</b>	<b>103%</b>	<b>95%</b>
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)				65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik (%)				1.63	-	-	-	-	1.63	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
3	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN (%)				85.01	85.00	86.00	87.00	88.00	85.01	85.00	86.00	87.00	88.00	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rata-rata Nila SKP Seluruh ASN Dinas Perkebunan (%)				80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	100%	100%	100%	100%	100%
5	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA (%)				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	100%	100%	100%	100%
	2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset (%)				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	100%	100%	100%	100%
	3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit (%)				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	100%	100%	100%	100%
<b>II</b>	<b>Persentase Penurunan Pekebun Miskin (%)</b>				-	-	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	-	-	-	<b>5.00</b>	-	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
6	Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapat Bantuan (Orang)				-	-	72.00	12.00	14.00	-	-	-	12.00	-	0%	0%	0%	100%	0%

**Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
III	<b>Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan (%)</b>				<b>8.68</b>	<b>9.03</b>	<b>9.39</b>	<b>9.76</b>	<b>10.15</b>	<b>8.68</b>	<b>6.53</b>	<b>7.04</b>	<b>7.00</b>	<b>7.20</b>	<b>100%</b>	<b>72%</b>	<b>75%</b>	<b>72%</b>	<b>71%</b>
7	1) Luas Areal Komoditi Perkebunan (Ha) :																		
	1. Sawit Rakyat				27,500	27,860	28,060	28,410	28,810	27,628	27,840	27,585	28,322	28,516	100%	100%	98%	100%	99%
	2. Sawit PBS				188,360	190,820	191,820	192,820	193,820	189,655	199,745	204,373	190,400	190,797	101%	105%	107%	99%	98%
	3. Karet Rakyat				18,650	18,711	18,910	18,960	19,010	18,288	18,217	18,032	17,996	17,833	98%	97%	95%	95%	94%
	4. Karet PBS				3,679	3,879	4,279	4,479	4,879	3,175	2,963	2,970	2,925	2,925	86%	76%	69%	65%	60%
	5. Lada				4,841	4,846	4,864	4,909	4,920	4,535	4,420	4,213	3,719	3,375	94%	91%	87%	76%	69%
	6. Kelapa				8,784	8,684	8,584	8,484	8,384	8,643	8,463	8,338	7,311	7,261	98%	97%	97%	86%	87%
	7. Kopi				551	551	604	664	754	551	500	498	70	72	100%	91%	82%	10%	10%
	8. Kakao				147	143	148	153	158	147	143	112	71	70	100%	100%	76%	46%	44%
	9. Aren				343	343	363	373	393	273	281	249	247	237	80%	82%	69%	66%	60%
	2) Jumlah Petani Pekebun (KK) :																		
	1. Rakyat				30,448	31,427	31,432	31,439	31,449	30,587	30,226	29,350	29,057	28,684	100%	96%	93%	92%	91%
	2. Plasma				16,305	16,905	16,905	16,905	16,905	16,305	16,905	16,305	16,756	16,756	100%	100%	96%	99%	99%
8	1) Produksi Komoditi Perkebunan (Ton) :																		
	1. Sawit Rakyat				241,200	250,000	270,000	290,000	320,000	232,719	62,832	297,810	248,311	250,253	96%	25%	110%	86%	78%
	2. Sawit PBS				1,745,000	1,785,000	1,856,000	1,956,894	2,230,859	1,738,708	2,809,085	5,221,607	2,628,288	2,754,458	100%	157%	281%	134%	123%
	3. Karet Rakyat				8,165	10,000	11,200	12,400	14,000	16,555	7,205	8,804	9,035	8,891	203%	72%	79%	73%	64%
	4. Karet PBS				766	761	750	741	726	1,532	1,147	1,147	1,846	1,846	200%	151%	153%	249%	254%
	5. Lada				2,633	3,560	3,870	4,170	4,389	3,587	3,984	3,514	1,832	1,647	136%	112%	91%	44%	38%

**Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	6. Kelapa				4,743	5,100	5,500	5,800	6,000	7,413	6,686	4,843	2,908	2,342	156%	131%	88%	50%	39%
	7. Kopi				23	23	28	33	38	23	6	9	5	6	100%	26%	32%	16%	15%
	8. Kakao				45	34	45	56	67	45	32	50	30	33	100%	94%	111%	53%	49%
	9. Aren				263	392	470	588	764	265	280	305	396	346	101%	71%	65%	67%	45%
	2) PAD Kebun Dinas Perkebunan (Rp.) :				-	-	-	415,000,000	460,000,000	-	-	-	148,050,000	525,974,500	-	-	-	36%	114%
9	Panjang Jalan Produksi (Km) :				654	-	1,400	-	-	654	-	1,400	-	-	100%	-	100%	-	-
10	Luasan Penurunan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan (Ha) :				145	130	110	-	-	145	130	110	-	-	100%	100%	100%	-	-
11	Jumlah Penurunan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan (Kasus)				21	19	17	-	-	21	19	17	-	-	100%	100%	100%	-	-
12	1) Pertumbuhan Nilai Tukar Petani (NTP) pekebun				101	105	109	-	-	101	105	109	-	-	100%	100%	100%	-	-
	2) Pertumbuhan Jumlah Pekebun (KK)				50,565	54,015	58,122	-	-	46,892	47,131	45,655	-	-	93%	87%	79%	-	-
13	Produktivitas Komoditi Perkebunan (Kg/Ha) :																		
	1. Sawit				18,700	19,300	20,000	-	-	14,699	17,258	17,284	-	-	79%	89%	86%	-	-
	2. Karet				1,470	1,530	1,590	-	-	2,295	888	1,038	-	-	156%	58%	65%	-	-
	3. Lada				1,260	1,310	1,380	-	-	1,004	1,135	1,028	-	-	80%	87%	74%	-	-
	4. Kelapa				360	375	395	-	-	1,222	1,126	805	-	-	339%	300%	204%	-	-

**Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	5. Kopi				1,060	1,130	1,220	-	-	418	306	391	-	-	39%	27%	32%	-	-
	6. Kakao				1,205	1,220	1,240	-	-	847	577	909	-	-	70%	47%	73%	-	-
	7. Aren				780	1,220	1,350	-	-	1,945	1,734	2,089	-	-	249%	142%	155%	-	-
14	Harga Pasar Komoditi Perkebunan (Rp.) :																		
	1. Sawit Rakyat				1,246	954	1,000	1,050	1,150	1,242	937	889	1,125	1,300	100%	98%	89%	107%	113%
	2. Sawit PBS				1,629	1,529	1,550	1,600	1,650	1,629	1,529	1,383	1,632	2,100	100%	100%	89%	102%	127%
	3. Karet				6,629	6,536	6,884	7,050	7,400	6,979	6,741	6,590	6,673	9,000	105%	103%	96%	95%	122%
	4. Lada				106,825	65,004	82,000	100,000	110,000	107,608	70,196	36,083	37,350	50,000	101%	108%	44%	37%	45%
	5. Kelapa				4,277	4,078	4,277	4,500	4,800	4,345	3,880	3,600	3,144	4,000	102%	95%	84%	70%	83%
	6. Kopi				22,821	24,366	25,000	26,000	27,000	23,821	24,054	25,442	30,200	35,000	104%	99%	102%	116%	130%
	7. Kakao				19,083	20,250	22,000	23,000	24,000	25,000	20,250	25,000	28,673	30,000	131%	100%	114%	125%	125%
	8. Aren				17,065	17,599	18,500	20,000	21,500	17,036	17,723	20,625	23,000	25,000	100%	101%	111%	115%	116%

Sumber Data : Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (2021)

### **2.3.2. Realisasi Anggaran**

Pada Tahun 2019 Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan Perubahan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 s/d 2021, dimana dari 14 (empat belas) program yang ada, terdapat 5 (lima) program yang tidak lagi dianggarkan pada Tahun 2020, sehingga hanya tertinggal sebanyak 9 (sembilan) program, yaitu :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perkebunan
7. Perluasan Komoditas Perkebunan
8. Peningkatan Produksi Perkebunan
9. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan

Kemudian dengan diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tahun 2021 melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, yaitu :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
5. Perizinan Usaha Pertanian
6. Penyuluhan Pertanian

Perencanaan anggaran harus dirumuskan sedemikian rupa agar dalam pendanaan program kegiatan pembangunan dilaksanakan secara efisien dalam artian terjadi keseimbangan antara pengeluaran biaya dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Perkebunan. Tabel T-C.24 di bawah ini menunjukkan gambaran pendanaan program kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dari Tahun 2017 s/d 2021. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2017-2020, pendanaan program kegiatan bersumber dari APBD dan APBN. Perkembangan pagu anggaran sempat mengalami penurunan pada tahun 2018 pagu anggaran hanya sebesar Rp. 6.550.710.200,-, namun mulai dari tahun 2019 pagu anggaran terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2021 pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 29.675.350.674,- dengan rasio realisasi anggaran yaitu pada tahun 2018 mencapai 70,08% dan tahun 2021 mencapai 90,75%.

## **Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

Rendahnya realisasi anggaran pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 4.590.712.558,- (70,08%) dari pagu Rp. 6.550.710.200,- terjadi disebabkan oleh adanya selisih antara HPS dan realisasi kegiatan barang dan jasa, serta rendahnya penyerapan anggaran kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Sedangkan tingginya realisasi anggaran pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 26.929.155.286,- (90,75%) dari pagu Rp. 29.675.350.674,- terjadi disebabkan oleh dapat dimaksimalkannya penyerapan anggaran dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dari Tahun 2017 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dari Tahun 2017 s/d 2021**

No	Program	Anggaran Pada Tahun (dalam juta)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam juta)					Rasio Antara Realisasi & Anggaran Pada Tahun (persen)					Rata-Rata Pertumbuhan (persen)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Ang-garan	Realisasi
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.065	2.061	3.602	3.134	-	1.947	1.948	2.702	2.941	-	94,27	94,53	75,02	93,85	-	12.93	12.76
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	182	249	385	952	-	182	247	385	720	-	99,99	99,37	99,97	75,64	-	105.48	73.71
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	380	-	-	-	-	174	-	-	-	-	45,93	-	-	-	-
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	100	351	-	-	-	91	303	-	-	-	91,50	86,40	-	125.83	116.04
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.288	1.170	503	1.333	-	1.195	1.170	499	1.276	-	92,80	100	99,27	95,69	-	0.88	1.69
6	Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perkebunan	-	-	-	395	-	-	-	-	329	-	-	-	-	83,32	-	-	-
7	Perluasan Komoditas Perkebunan	3.221	2.861	4.725	7.704	-	1.850	1.018	3.340	6.942	-	57,43	35,60	70,70	90,10	-	34.79	68.80
8	Peningkatan Produksi Perkebunan	800	54	315	9.563	-	796	53	310	8.369	-	99,57	97,83	98,51	87,51	-	273.86	237.67
9	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan	850	-	1.418	-	-	816	-	1.325	-	-	96,10	-	93,46	-	-	33.41	31.12
10	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan	-	50	479	-	-	-	49	465	-	-	-	98,50	97,14	-	-	429.32	422.69
11	Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	50	50	350	-	-	0	49	349	-	-	-	99,87	99,96	-	-	150.00	-

**Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	Program	Anggaran Pada Tahun (dalam juta)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam juta)					Rasio Antara Realisasi & Anggaran Pada Tahun (persen)					Rata-Rata Pertumbuhan (persen)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
12	Peningkatan Kesejahteraan Pekebun	50		2.034	-	-	0		1.939	-	-			95,35	-	-	-	-
13	Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan	50	53	170	-	-	46	52	170	-	-	93,99	98,15	100	-	-	80,00	87,24
14	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	-	-	200	600	-	-	-	199	506	-	-	-	99,97	84,34	-	100,02	76,57
15	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	27.774	-	-	-	-	25.330	-	-	-	-	91,20	-	-
16	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	-	-	-	-	1.064	-	-	-	-	971	-	-	-	-	91,31	-	-
17	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	-	-	100	-	-	-	-	71	-	-	-	-	71,41	-	-
18	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	-	-	-	-	300	-	-	-	-	213	-	-	-	-	71,24	-	-
19	Perizinan Usaha Pertanian	-	-	-	-	100	-	-	-	-	72	-	-	-	-	72,02	-	-
20	Penyuluhan Pertanian	-	-	-	-	336	-	-	-	-	269	-	-	-	-	80,18	-	-
<b>Total</b>		<b>8.558</b>	<b>6.550</b>	<b>14.663</b>	<b>24.035</b>	<b>29.675</b>	<b>6.835</b>	<b>4.590</b>	<b>11.954</b>	<b>21.388</b>	<b>26.929</b>	<b>79,87</b>	<b>70,08</b>	<b>81,53</b>	<b>88,99</b>	<b>90,75</b>	<b>45,21</b>	<b>53,22</b>

Sumber Data : Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (2021)

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN**

Sebagai dinas teknis yang sebagian tugasnya berkaitan langsung dengan masyarakat terutama petani perkebunan, Dinas Perkebunan harus focus pada pelayanan prima terhadap “konsumen”nya. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan publik merupakan sebuah tantangan besar bagi Dinas Perkebunan untuk menjadi organisasi pemerintah yang lebih baik. Melalui analisis SWOT (Strength-Weakness-Opportunity-Treat), maka kondisi umum Dinas Perkebunan dengan pelayanan publik dapat ditinjau sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strenght*) yang dimiliki :
  - a. Kualitas dan kuantitas SDM aparatur cukup memadai
  - b. Ketersediaan anggaran dan fasilitas penunjang tupoksi cukup memadai
  - c. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
  - d. Tersedianya potensi kawasan areal perkebunan
  - e. Banyaknya jenis hasil perkebunan yang dihasilkan Kutai Kartanegara
2. Kelemahan (*Weakness*) yang dimiliki :
  - a. Terbatasnya tenaga penyuluh lapangan
  - b. Alih fungsi lahan perkebunan dan tata ruang pembangunan
  - c. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan stakeholder belum berjalan baik
  - d. Data dan informasi perencanaan pembangunan perkebunan belum akurat
  - e. Penerapan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan masih rendah
3. Peluang (*Oportunity*) yang dimiliki :
  - a. Tersedianya kompetensi tenaga kerja
  - b. Tingginya minat masyarakat terhadap komoditi perkebunan
  - c. Kondusifnya iklim investasi dan peluang pasar terhadap produk perkebunan
  - d. Kemajuan teknologi pengolahan produk perkebunan
  - e. Selarasnya kebijakan antara pusat dan daerah di bidang perkebunan
4. Tantangan (*Treat*) yang dimiliki :
  - a. Persaingan kualitas produk perkebunan
  - b. Kondisi infrastruktur kurang menunjang
  - c. Implementasi tata ruang secara nasional belum terintegrasi, sehingga menimbulkan tumpang tindih peruntukan lahan
  - d. Perubahan cuaca/iklim sebagai imbas dari *global warning*
  - e. Aksesibilitas ke kawasan perkebunan masih terbatas

### III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

#### 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN

Perencanaan pembangunan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan dari hasil capaian kinerja pembangunan perkebunan pada periode lima tahun sebelumnya disebabkan oleh **"Belum optimalnya produksi perkebunan dan terjadinya penurunan produksi dari beberapa komoditas unggulan perkebunan, serta rendahnya Pendapatan dan kesejahteraan pekebun"**. Permasalahan pokok tersebut muncul karena adanya berbagai hambatan dan permasalahan yang dihadapi, yaitu :

##### 1. Produktivitas tanaman perkebunan masih rendah

Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan produksi adalah rendahnya produktivitas perkebunan rakyat, yang sebagian besar tanamannya sudah tua dan rusak, serta tidak diikuti dengan peremajaan dan pemeliharaan yang baik. Berikut disajikan produktivitas komoditi perkebunan rakyat tahun 2016-2020 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.1. Produktivitas Komoditi Perkebunan Rakyat Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020**

No	Komoditi	Produktivitas (Kg/Ha)					Produktivitas Kaltim (Kg/Ha)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Kelapa Sawit	14.938	14.699	17.258	17.284	12.992	14.181
2	Karet	1.072	2.295	888	1.038	947	1.173
3	Lada	634	1.004	1.135	1.028	588	816
4	Kelapa Dalam	876	1.222	1.126	805	511	781
5	Kopi	220	418	306	391	250	254
6	Kakao	621	847	577	909	721	643
7	Aren	895	1.945	1.734	2.089	2.700	1.080

Sumber Data : Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (2021)

Dari tabel di atas terlihat bahwa produktivitas komoditi perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum cukup fluktuatif dalam periode 2016 – 2020. Produktivitas kelapa sawit rakyat pada tahun 2020 mengalami penurunan dan lebih rendah dari rerata

produktivitas kelapa sawit rakyat Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 14.181 kg TBS/ha. Penurunan produktivitas kelapa sawit rakyat yang cukup besar tersebut disebabkan oleh menurunnya produksi di 4 (empat) kecamatan yaitu Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong dan Tenggarong Seberang sehingga produktivitas kelapa sawit di empat kecamatan tersebut mengalami penurunan menjadi 5,5 – 9,7 ton/hektar sedangkan produktivitas di 14 (empat belas) kecamatan lainnya relatif tinggi yaitu di kisaran 12 – 18 ton/hektar.

Produktivitas karet rakyat Kutai Kartanegara yang pada tahun 2020 sebesar 947 kg/ha. juga mengalami penurunan dari tahun 2019 dan masih lebih rendah dari rerata produksi karet rakyat Provinsi Kalimantan Timur yang berada di 1.173 kg sheet/ha. Hal ini disebabkan oleh produktivitas di sebagian besar kecamatan berada di bawah 900 kg lump/ha. sebagai akibat dari rendahnya produksi. Rendahnya produksi tersebut merupakan akibat dari harga karet mentah yang tidak menguntungkan pekebun sehingga pekebun tidak melakukan panen. Hanya di 3 (tiga) kecamatan sentra yang produktivitasnya cukup baik, yaitu Marang Kayu, Muara Badak dan Loa Janan yaitu mencapai di atas 1.200 – 1.350 kg/ha.

Produktivitas lada yang pada tahun 2020 sebesar 588 kg lada/ha, juga mengalami penurunan dari tahun 2019 yang mencapai 1.028 kg/ha dan masih lebih rendah dari rerata produksi lada Provinsi Kalimantan Timur yang berada di 816 kg/ha. Hal ini disebabkan oleh produksi di 3 (tiga) kecamatan sentra utama lada yaitu Muara Badak, Loa Janan dan Samboja mengalami penurunan yang disebabkan oleh bertambahnya tanaman tidak menghasilkan/tanaman rusak akibat gangguan fungsi lingkungan hidup. Produktivitas lada pada ketiga kecamatan sentra tersebut berada di kisaran 600 – 940 kg/ha.

Kutai Kartanegara juga merupakan salah satu daerah sentra produksi kelapa dalam di Provinsi Kalimantan Timur. Produktivitas kelapa dalam yang pada tahun 2020 sebesar 511 kg kopra/ha. juga mengalami penurunan dari tahun 2019 yang mencapai 805 kg/ha. dan masih lebih rendah dari rerata produksi kelapa Provinsi Kalimantan Timur yang berada di 781 kg/ha. Hal ini disebabkan oleh produksi di 3 (tiga) kecamatan sentra utama kelapa yaitu Samboja, Muara Jawa dan Marang Kayu mengalami penurunan yang disebabkan oleh bertambahnya tanaman tidak menghasilkan/tanaman rusak akibat gangguan fungsi lingkungan hidup. Produktivitas kelapa di ketiga kecamatan sentra tersebut berada di kisaran 400 – 677 kg/ha.

Produktivitas dan produksi kopi dan kakao juga mengalami penurunan pada tahun 2020. Hanya komoditas aren yang mengalami peningkatan produksi dan produktivitas pada tahun 2020.

Permasalahan "**Produktivitas tanaman perkebunan masih rendah**" dipicu oleh beberapa akar masalah yaitu :

- 1) Terbatasnya kuota pupuk subsidi dan lemahnya daya beli pekebun terhadap pupuk non subsidi
- 2) Penggunaan bibit yang tidak unggul/tidak bersertifikasi oleh pekebun
- 3) Masih lemahnya penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan
- 4) Tanaman yang usianya sudah di atas 25 tahun (karet)
- 5) Gangguan OPT Endemis
- 6) Masih kurangnya ketersediaan mesin dan peralatan budidaya dan panen
- 7) Tidak memadainya prasarana irigasi pada areal perkebunan, khususnya tanaman kelapa dan lada (pintu air, embung)
- 8) Pendangkalan pada saluran parit di kebun kelapa dalam
- 9) Kualitas jalan produksi perkebunan belum memadai
- 10) Berkurangnya luas areal dan luas tanaman menghasilkan (TM), terutama pada tanaman kelapa dalam, lada, kopi dan kakao
- 11) Banyaknya lahan fungsional tanaman perkebunan yang dialih fungsikan dan alih komoditas

Kuota pupuk subsidi dari Pemerintah pusat hingga tahun 2020 masih cukup jauh di bawah kebutuhan untuk sector pertanian (sub sektor perkebunan, sub sektor tanaman pangan, sub sektor hortikultura, sub sektor peternakan) dan sub sektor perikanan. Jika dihitung dari luas tanam tanaman perkebunan untuk 7 komoditas, kebutuhan pupuk subsidi mencapai sekitar 19.382 ton sementara alokasi untuk sub sektor perkebunan hanya 3.545 ton per tahun sehingga terdapat kekurangan kuota sekitar 15.836 ton. Akibatnya cukup banyak pekebun yang tidak melakukan pemeliharaan tanaman menggunakan pupuk sesuai dosis anjuran.

Penggunaan bibit tanaman perkebunan yang tidak unggul erat kaitanya dengan daya beli, ketersediaan bibit unggul bersertifikat dan kesadaran pekebun dalam menggunakan bibit unggul. Penggunaan bibit unggul bersertifikat sangat penting peranannya dalam mendukung peningkatan produktivitas tanaman.

## **2. Pemanfaatan lahan oleh perusahaan perkebunan belum optimal**

Saat ini luas lahan IUP yang telah diterbitkan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah seluas 678.980 Ha, sementara total luas kebun kelapa sawit yang telah dimanfaatkan menjadi kebun inti dan plasma baru seluas 193.330 Ha (28,47%). Dari data ini menunjukkan bahwa terdapat 485.650 Ha IUP yang diberikan belum direalisasikan menjadi kebun kelapa sawit dan karet.

Dari data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi ketidak efisienan dalam pemanfaatan lahan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti tidak clear dan cleannya izin yang diberikan kemudian menyebabkan permasalahan konflik lahan antara sesama perusahaan dan masyarakat yang menghambat laju penanaman. Juga terdapat

ketidaktaatan perusahaan perkebunan dalam melaksanakan ketentuan perizinan, keadaan seperti ini menyebabkan iklim usaha yang tidak kondusif karena tertutupnya investasi baru dan kesulitan masyarakat dalam mengakses lahan.

**Tabel 3.1.2. Realisasi Tanam Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020**

No	Nama Perusahaan	Luas Izin (Ha)	Realisasi Tanam Inti (Ha)	Realisasi Tanam Plasma (Ha)	Jumlah (Ha)
<b>A.</b>	<b>KOMODITI KELAPA SAWIT</b>				
1	PT. Budiduta Agro Makmur	6.845,74	2.047	-	2.047
2	PT. Rea Kaltim Plantation	30.106,00	22.964	1.914	24.878
3	PT. Perkebunan Kaltim Utama I	17.000,00	1.966	776	2.742
4	PT. Alam Jaya Persada	13.000,00	2.525	1.046	3.571
5	PT. Jaya Mandiri Sukses	21.000,00	10.919	2.847	13.766
6	PT. Sawit Kaltim Lestari	2.000,00	3.435	1.746	5.181
7	PT. Manunggal Adi Jaya	22.341,00	3.828	553	4.381
8	PT. Kota Bangun Plantation	18.000,00	1.316	329	1.645
9	PT. Suryabumi Tunggal Perkasa	17.500,00	2.020	402	2.422
10	PT. Agrojaya Tirta Kecana	20.000,00	9.188	1.307	10.495
11	PT. Agri Eastborneo Kencana	12.000,00	5.878	1.600	7.478
12	PT. Kutai Agro Jaya	3.660,00	1.888	103	1.991
13	PT. Sasana Yudha Bhakti	6.000,00	1.908	-	1.908
		10.710,00	2.688	983	3.671
14	PT. Bahtera Bahagia	13.000,00	320	-	320
15	PT. Tritunggal Sentra Buana	12.000,00	9,484	1.358	10.842
		1.384,00	-	-	-
		1.020,00	-	-	-
16	PT. Maju Kalimantan Hadapan	20.000,00	15.012	1.306	16.318
17	PT. Hamparan Sentosa	15.800,00	7.961	1.136	9.097
18	PT. Cahaya Anugerah Plantation	17.000,00	6.282	141	6.423
19	PT. Bekacak Himba Bahari	2.015,80	1.830	-	1.830
20	PT. Mahakam Sawit Plantation	19.500,00	3.072	768	3.840
21	PT. Kutai Sawit Plantation	20.000,00	1.726	432	2.158
22	PT. Malaya Sawit Khatulistiwa	19.000,00	1.158	290	1.448
23	PT. Sawit Khatulistiwa Plantation	21.000,00	2.084	521	2.605
		20.000,00	3.886	658	4.544
24	PT. Kalpataru Sawit Plantation	20.000,00	1.421	355	1.777
25	PT. Kutai Inti Utama	21.000,00	603	151	753
26	PT. Teguh Jayaprima Abadi	5.100,00	2.500	600	3.100
		13.550,00	1.200	219	1.419

**Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	Nama Perusahaan	Luas Izin (Ha)	Realisasi Tanam Inti (Ha)	Realisasi Tanam Plasma (Ha)	Jumlah (Ha)
27	PT. Prima Mitrajaya Mandiri	21.500,00	7.526	3.879	11.405
28	PT. Tunas Prima Sejahtera	20.000,00	4.291	919	5.210
29	PT. Sawit Prima Sakti	3.250,00	2.162	299	2.461
30	PT. Niagamas Gemilang	16.500,00	5.048	1.193	6.241
31	PT. Mitra Bangsa Utama	12.095,00	687	264	951
32	PT. Enggang Alam Sawita	2.277,00	1.742	415	2.158
33	PT. Subur Sawit Platinum	14.054,22	-	-	-
34	PT. Prasetya Utama	8.588,44	-	-	-
35	PT. Muara Kaman Sawit Sejahtera	2.794,00	100	-	100
36	PT. Kota Bangun Sawit Sejahtera	7.500,00	200	200	400
37	PT. Sawit Golden Prima	15.592,00	2.845	-	2.845
38	PT. Bina Graha Utama Makmur	13.000,00	-	-	-
39	PT. Jonggon Gerbang Sawit	1.000,00	-	-	-
40	PT. Persada Bangun Jaya	2.655,71	-	-	-
		2.242,06	-	-	-
41	PT. Tunas Sejati Abadi Tabang	16.000,00	-	-	-
42	PT. Tunas Sejati Abadi Muara Kaman	3.541,00	-	-	-
43	PT. Mula Persada Raya	1.322,32	300	-	300
44	PT. Andra Karya Utama	7.500,00	-	-	-
45	PT. Sukses Bina Alam	849,62	458	-	458
46	PT. Agro Bumi Kaltim	4.424,00	3.590	1.016	4.606
47	PT. Andalas Agripalma Mandiri	2.995,00	-	-	-
48	PT. Sandika Darma Abadi	2.216,00	-	615	615
49	PT. Karya Teknik Plantation		-	-	-
50	PT. Sawit Unggul Agro Niaga		-	-	-
51	PT. Bina Insan Lestari Utama	10.000,00	-	-	-
52	Kop. Bina Tani Sawit Lestari	1.155,00	-	-	-
53	Kop. Bina Tani Sawit Sedulang	1.600,00	-	-	-
54	Kop. Bina Tani Manamang Kiwa	300,00	-	-	-
55	Kop. Pegawai Republik Indonesia AROMA	633,99	-	-	-
56	Kop. Perkebunan Maju Membangun	800,00	-	-	-
57	Kop. Perkebunan Sawit Sendowan (Puan Cepak)	1.500,00	-	-	-
58	Kop. Perkebunan Sawit Sendowan (Sedulang)	2.000,00	-	-	-
59	Kop. Sawit Etam Bersama	384,00	-	-	-
	<b>Jumlah Kelapa Sawit</b>	<b>671.801,90</b>	<b>160.059</b>	<b>30.341</b>	<b>190.400</b>

## **Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

<b>B.</b>	<b>KOMODITI KARET</b>				
1.	PT. Budiduta Agro Makmur	6.000,00	2.903	-	2.903
2.	PT. Recouse Alam Indonesia	1.178,28	27	-	27
	<b>Jumlah Komoditi Karet</b>	<b>7.178,28</b>	<b>2.930</b>	<b>-</b>	<b>2.930</b>
	<b>Total Kelapa Sawit dan Karet</b>	<b>678.980,18</b>	<b>162.989</b>	<b>30.341</b>	<b>193.330</b>

Sumber Data : Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (2021)

Permasalahan "**Pemanfaatan lahan oleh perusahaan perkebunan belum optimal**" disebabkan oleh beberapa akar masalah yaitu :

- 1) Adanya lahan yang tertumpang tindih dengan perijinan usaha lainnya
- 2) Kurangnya ketaatan perusahaan perkebunan dalam melaksanakan ketentuan perizinan
- 3) Terdapat bagian dari lahan yang diberikan izin kondisinya tidak dapat ditanami
- 4) Masih banyak terjadi konflik usaha perkebunan
- 5) Izin Lokasi, IUP dan HGU yang tidak diusahakan belum ada upaya pencabutan

### **3. Harga komoditi perkebunan fluktuatif dan belum memberikan keuntungan yang wajar bagi pekebun**

Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pekebun adalah harga komoditi perkebunan yang fluktuatif dan sehingga belum memberikan keuntungan yang wajar bagi para pekebun. Hal ini antara lain disebabkan oleh rendahnya mutu produk perkebunan, serta ketergantungan penjualan hasil perkebunan kepada pengepul. Berikut disajikan harga pasar rata-rata komoditi perkebunan rakyat tahun 2016-2020 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.3. Harga Pasar Rata-Rata Komoditi Perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020**

<b>No</b>	<b>Komoditi</b>	<b>Harga Pasar Komoditi Perkebunan (Rp.)</b>				
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	Kelapa Sawit	1.065	1.242	937	889	1.125
2	Karet	5.415	6.979	6.741	6.590	6.673
3	Lada	127.905	107.608	70.196	36.083	37.350
4	Kelapa Dalam	3.858	4.345	3.880	3.600	3.144
5	Kopi	21.954	23.821	24.054	25.442	30.200
6	Kakao	27.903	25.000	20.250	25.000	28.673
7	Aren	20.365	17.036	17.723	20.625	23.000

Sumber Data : Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (2021)

Permasalahan "**Harga komoditi perkebunan fluktuatif dan belum memberikan keuntungan yang wajar bagi pekebun**" dipicu oleh beberapa akar masalah yaitu :

- 1) Kurangnya baiknya penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil komoditas perkebunan
- 2) Mutu produk yang masih rendah

- 3) Rendahnya pengetahuan dan keterampilan pekebun dalam aspek panen, pasca panen dan pengolahan hasil
- 4) Rendahnya kesadaran pekebun untuk berperan aktif dalam penguatan kelembagaan kemitraan, pengolahan hasil dan pemasaran produk
- 5) Tingginya ketergantungan penjualan hasil pada pengepul, dimana masih kurangnya akses kemitraan pemasaran komoditi perkebunan
- 6) Kurangnya ketersediaan sarana penanganan pasca panen dan pengolahan hasil
- 7) Belum berkembangnya dengan baik industri hilir pengolahan lada

#### **4. Skala usaha yang masih rendah**

Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pekebun adalah skala usaha yang masih rendah, dimana lebih dari 70% pekebun kelapa sawit hanya memiliki lahan kurang dari 4 hektar per KK. Permasalahan **"Skala usaha yang masih rendah"** dipicu oleh akar masalah berupa keterbatasan modal pekebun untuk kepemilikan lahan yang lebih luas.

Dari pemaparan di atas, permasalahan yang dihadapi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel pemetaan permasalahan sebagai berikut :

**Tabel 3.1.4. Pemetaan Permasalahan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021**

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah (Penyebab Masalah Pokok)</b>	<b>Akar Masalah</b>
1	Belum optimalnya produksi perkebunan dan terjadinya penurunan produksi dari beberapa komoditas unggulan perkebunan	1. Produktivitas tanaman perkebunan masih rendah	1. Terbatasnya kuota pupuk subsidi dan lemahnya daya beli pekebun terhadap pupuk non subsidi 2. Penggunaan bibit yang tidak unggul/tidak bersertifikasi oleh pekebun 3. Masih lemahnya penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan 4. Tanaman yang usianya sudah di atas 25 tahun (karet) 5. Gangguan OPT Endemis 6. Masih kurangnya ketersediaan mesin dan peralatan budidaya dan panen 7. Tidak memadainya prasarana irigasi pada areal perkebunan, khususnya tanaman kelapa dan lada (pintu air, embung) 8. Pendangkalan pada saluran parit di kebun kelapa dalam 9. Kualitas jalan produksi perkebunan belum memadai

No	Masalah Pokok	Masalah (Penyebab Masalah Pokok)	Akar Masalah
			10. Berkurangnya luas areal dan luas tanaman menghasilkan (TM), terutama pada tanaman kelapa dalam, lada, kopi dan kakao.
			11. Banyaknya lahan fungsional tanaman perkebunan yang dialih fungsikan dan alih komoditas
		2. Pemanfaatan lahan oleh perusahaan perkebunan belum optimal.	1. Adanya lahan yang tertumpang tindih dengan perijinan usaha lainnya
			2. Kurangnya ketaatan perusahaan perkebunan dalam melaksanakan ketentuan perizinan
			3. Terdapat bagian dari lahan yang diberikan izin kondisinya tidak dapat ditanami
2	Pendapatan/ kesejahteraan pekebun masih rendah	1. Harga komoditi perkebunan fluktuatif dan belum memberikan keuntungan yang wajar bagi pekebun	1. Kurangnya baiknya penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil komoditas perkebunan
			2. Mutu produk yang masih rendah
			3. Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan pekebun dalam aspek panen, pasca panen dan pengolahan hasil
			4. Masih rendahnya kesadaran pekebun untuk berperan aktif dalam penguatan kelembagaan kemitraan, pengolahan hasil dan pemasaran produk
			5. Masih tingginya ketergantungan penjualan hasil pada pengepul (masih kurangnya akses kemitraan pemasaran komoditi perkebunan)
			6. Masih kurangnya ketersediaan sarana penanganan pasca panen dan pengolahan hasil
			7. Belum berkembangnya dengan baik industri hilir pengolahan lada
		2. Skala usaha yang masih rendah	Keterbatasan modal pekebun untuk kepemilikan lahan yang lebih luas

*Sumber Data : Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (2021)*

### **3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan lima tahun mendatang, permasalahan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai

visi pembangunan yang diharapkan. Permasalahan yang dirumuskan harus mampu menggambarkan setiap detail kondisi Kutai Kartanegara sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan relevan dengan penyelesaian permasalahan pembangunan. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni : **“Belum Optimalnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Kutai Kartanegara”**.

Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 6 (enam) pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Belum meratanya kualitas kesejahteraan masyarakat;
4. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah;
5. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah; dan
6. Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup.

Dari enam pokok permasalahan tersebut di atas, pokok Permasalahan yang terkait dengan pembangunan di bidang ekonomi dan erat kaitannya dengan sub sector perkebunan adalah : (1) belum meratanya kualitas kesejahteraan masyarakat dan (2) belum optimalnya pembangunan ekonomi daerah.

Perumusan isu strategis Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perencanaan pembangunan daerah periode pembangunan 2021-2026, dapat diselaraskan dengan arah kebijakan tahap IV RPJPD Kutai Kartanegara yang telah diinventarisasi setiap permasalahan yang relevan. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan dan tantangan pembangunan sebagaimana dijabarkan pada isu internasional, isu nasional, isu regional, maupun telaahan RTRW dan KLHS Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat diindikasikan bahwa isu strategis pada pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara periode pembangunan 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut :

- a. Implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh
- b. Peningkatan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia
- c. Percepatan penanganan dan penanggulangan COVID-19 dan pemulihan dampaknya
- d. Pengembangan perekonomian berkelanjutan
- e. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)
- f. Pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar untuk penguatan wilayah
- g. Transformasi dan percepatan pembangunan desa dan kecamatan

Hasil Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) 2020, Kalimantan Timur, pada Rabu tanggal 9 Desember 2020 adalah, pasangan Edi Damansyah dan Rendi Solihin

terpilih sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, yang mempunyai visi untuk membangun dan mengembangkan Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 :

**“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”**

Visi tersebut mengandung dua elemen utama pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Bupati dan wakil Bupati terpilih yaitu masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan masyarakat yang bahagia. Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut :

**Masyarakat yang sejahtera**, Batasan pengertian sejahtera, kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan. Diharapkan dari kemudahan mendapatkan kebutuhan dasar masyarakat dan perekonomian, masyarakat semakin sejahtera.

**Masyarakat yang berbahagia**, Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketenteraman Diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong-royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan dari menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat membuat warga Kabupaten Kutai Kartanegara semakin berbahagia.

Selain visi dan Misi, pasangan Edi Damansyah dan Rendi Solihin Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan filosofi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yaitu **Kukar Idaman**. Idaman secara etimologi berarti sesuatu yang diharapkan, yang didambakan, yang dicita-citakan. Sedangkan untuk akronim berarti inovatif, daya saing dan mandiri (Idaman). Kukar Idaman ialah satu gerakan yang mengoptimalkan seluruh potensi daerah, dengan mendorong kreatifitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dan menciptakan daya saing kemandirian yang didasari semangat kolaborasi dan sinegistas antara pemerintah kabupaten, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mewujudkan Kukar lebih baik ke depan.

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

Misi 1 : Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani

Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya

## Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

Misi 3 : Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah

Misi 5 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan

Dari visi dan misi pada Rancangan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 di atas tampak jelas bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara berhubungan dengan misi ketiga. Sesuai RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sektor perkebunan akan memainkan peran yang penting, secara langsung akan mengemban amanah untuk mensukseskan **Misi (3) Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan tujuan pembangunan dan indikator tujuan yang kemudian menjadi indikator makro pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 (lima) tahun ke depan yang menjadi tanggungjawab Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1. Indikator Tujuan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 Bagi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET AWAL 2020	TARGET AKHIR 2026
<b>Misi 3 : Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>			
Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batu Bara	0,62	5,89

*Sumber Data : Rancangan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026*

Berdasarkan tujuan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah di atas maka ditetapkan sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan, berikut disajikan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah yang menjadi tanggungjawab Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2.2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 Pada Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026**

Visi/ Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Data Awal	Target					Target Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Visi : "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera Dan Berbahagia"</b>									
<b>Misi 3 : Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>									
	<b>Tujuan :</b> Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batu Bara	0,62	3,74	5,46	5,81	5,72	5,89	5,89
	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,21	5,69	6,15	6,6	7,05	7,5	7,5

Sumber Data : Rancangan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Strategi merupakan suatu rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah jangka menengah daerah. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) dimana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Berdasarkan kertas kerja yang telah dikembangkan, strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 3.2.3. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan, Urusan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 Bagi RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026**

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program
<b>Visi : "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera Dan Berbahagia"</b>						
<b>Misi 3 : Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>						
	Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	1. Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

**Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

						3. Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 4. Perizinan Usaha Pertanian 5. Penyuluhan Pertanian
--	--	--	--	--	--	---

Sumber Data : Rancangan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Project strategis pembangunan daerah merupakan proyek-proyek yang memiliki daya ungkit untuk menyukseskan pencapaian visi, misi, program bupati dan wakil bupati. Setiap proyek strategis daerah harus dipastikan sumber pendanaannya agar terjamin setiap proyek strategis daerah dapat dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Proyek strategis pembangunan daerah merupakan proyek yang dapat mendukung visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Setiap proyek strategis daerah dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing OPD Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya bagi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 :

**Tabel 3.2.4. Proyek Strategis Pembangunan Daerah Bagi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026**

Visi	Misi	Proyek Strategis Pembangunan Daerah	Batasan Pengertian	Sumber Pendanaan
Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera Dan Berbahagia	Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pembangunan pertanian berbasis kawasan	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk menjamin kelangsungan proses transformasi ekonomi KUTAI KARTANEGARA, dengan menetapkan kawasan-kawasan strategis pertanian (dalam arti luas) secara terintegrasi, mulai dari kepastian ketersediaan lahan, pengairan, penyiapan petani unggul hingga sarana dan prasarana dan infrastuktur wilayah (jalan dan angkutan umum). Dengan kegiatan prioritas membangun 120 unit embung skala kecil dan 120 Km Jalan Usaha Tani pertanian/perkebunan selama periode kepemimpinan, Kerjasama produktif pertanian dengan membentuk unit usaha pertanian pada Perusda, Pembentukan BUM Desa Unit Usaha Pertanian serta Koperasi Petani yang sehat dan produktif, dan meningkatkan areal tanaman jagung sebesar 30.000 Hektar, dan Fasilitasi sarana dan prasarana 25.000 Nelayan dan Pembudidaya Perikanan Produktif dalam upaya peningkatan produksi dan akses pemasaran.	APBD/APBN/Swasta

Sumber Data : Rancangan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Menelaah **“Program Dedikasi KUKAR IDAMAN”** diatas, maka Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 diamanatkan mendukung **“Program Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan”**. Dimana untuk mendukung

## Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

Program Dedikasi KUKAR IDAMAN tersebut, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara akan berbagi peran dengan OPD terkait lainnya, yaitu Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pada "**Program Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan**", Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara diamanatkan untuk menetapkan kawasan-kawasan strategis pertanian (dalam arti luas) secara terintegrasi, mulai dari kepastian ketersediaan lahan, pengairan, penyiapan petani unggul hingga sarana dan prasarana dan infrastuktur wilayah (jalan dan angkutan umum). Dengan kegiatan prioritas membangun 120 unit embung skala kecil dan 120 Km Jalan Usaha Tani pertanian/perkebunan selama periode kepemimpinan, Kerjasama produktif pertanian dengan membentuk unit usaha pertanian pada Perusda, Pembentukan BUM Desa Unit Usaha Pertanian serta Koperasi Petani yang sehat dan produktif, serta pembinaan pekebun milenial unggul.

Dalam menjawab amanat Program Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan tersebut, dan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 830 Tahun 2018 Tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional, dimana Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 4 (empat) komoditi unggulan nasional, yaitu Kelapa Sawit, Karet, Lada dan Kelapa Dalam, serta berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, dimana untuk luasan kawasan kelapa sawit paling sedikit 6.000 hektar, sedangkan untuk luasan kawasan Karet, Lada dan Kelapa Dalam paling sedikit 3.000 hektar.

Berdasarkan telaahan diatas, maka ditetapkanlah "**Kawasan Unggulan Komoditas Perkebunan, Kawasan Andalan Komoditas Perkebunan dan Kawasan Potensial Komoditas Perkebunan**" yang akan dilaksanakan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, dimana untuk "**Kawasan Unggulan Komoditas Perkebunan**" dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.2.5. Kawasan Unggulan Komoditas Perkebunan**

No	Kawasan Unggulan	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	KK
1	<b>Kelapa Sawit 1 (BANGJOHAN)</b>	Kem. Janggut	6,059	55,146	13,121	1,794
		Kenohan	475	3,596	11,019	187
		Tabang	1,451	17,372	11,200	585
<b>Jumlah</b>			<b>7,985</b>	<b>76,113</b>	<b>12,021</b>	<b>2,566</b>
2	<b>Kelapa Sawit 2 (MARDAKNA)</b>	Marang Kayu	2,219	16,241	10,871	726
		Muara Badak	4,876	23,578	17,210	2,955
		Anggana	449	4,756	16,288	280
<b>Jumlah</b>			<b>7,544</b>	<b>44,574</b>	<b>14,124</b>	<b>3,961</b>
3	<b>Karet 1 (MARDAKNA)</b>	Marang Kayu	4,341	3,760	1,248	1,897
		Muara Badak	2,376	1,566	1,359	1,160
		Anggana	1,007	428	988	309
<b>Jumlah</b>			<b>7,724</b>	<b>5,754</b>	<b>1,252</b>	<b>3,366</b>

No	Kawasan Unggulan	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	KK
4	<b>Karet 2 (KOWISTA)</b>	Kota Bangun	1,935	336	675	452
		Muara Wis	341	221	720	175
		Muara Muntai	775	181	565	440
<b>Jumlah</b>			<b>3,051</b>	<b>738</b>	<b>656</b>	<b>1,067</b>
5	<b>Lada (LOBASA)</b>	Loa Janan	2,857	1,494	600	1,170
		Muara Badak	358	214	941	320
		Samboja	450	113	320	367
<b>Jumlah</b>			<b>3,665</b>	<b>1,821</b>	<b>593</b>	<b>1,857</b>
6	<b>Kelapa Dalam (MASAMBA)</b>	Muara Jawa	1,799	486	400	1,146
		Samboja	2,148	1,243	678	752
		Muara Badak	164	79	709	273
<b>Jumlah</b>			<b>4,111</b>	<b>1,807</b>	<b>572</b>	<b>2,171</b>

Sumber Data : Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (2020)

Sedangkan untuk "Kawasan Andalan Komoditas Perkebunan" dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.2.6. Kawasan Andalan Komoditas Perkebunan**

No	Kawasan Andalan	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	KK
1	<b>Kopi</b>	Loa Kulu	3	0,49	245	3
		Tenggarong	2	0,80	400	15
		Sebulu	11	2,35	782	12
		Muara Jawa	5	0,50	100	5
		Samboja	15	0,60	120	46
		Loa Janan	23	0,97	121	31
		Marang Kayu	2	0,12	60	1
<b>Jumlah</b>			<b>59</b>	<b>4,67</b>	<b>233</b>	<b>112</b>
2	<b>Kakao</b>	Loa Kulu	30	23,33	972	23
		Kota Bangun	1,5	0,59	1,176	5
		Kem. Janggut	16	3,15	450	13
		Kenohan	6	1,15	192	8
		Tabang	1	1	500	2
<b>Jumlah</b>			<b>53,5</b>	<b>28,22</b>	<b>752</b>	<b>49</b>
3	<b>Aren</b>	Kenohan	21,5	50,94	3,773	63
		Kota Bangun	17	60,50	6,050	65
		Muara Kaman	106	115,20	1,920	70
		Loa Kulu	26,75	72,63	4,539	22
		Tenggarong	7	26	5,204	36
<b>Jumlah</b>			<b>178,25</b>	<b>325,29</b>	<b>3,113</b>	<b>256</b>

Sumber Data : Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (2020)

Sedangkan untuk "Kawasan Potensial Komoditas Perkebunan" dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.2.7. Kawasan Potensial Komoditas Perkebunan**

No	Kawasan Potensial	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	KK
1	Kelor	Loa Kulu	1	1,2	1.200	20
		Sanga-Sanga	0,5	0,5	1.000	10
<b>Jumlah</b>			<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>1,133</b>	<b>30</b>

Sumber Data : Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (2020)

### 3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA PROVINSI

#### 3.3.1. Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian

Pembangunan perkebunan kedepan akan tetap berfungsi sebagai salah satu pilar ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berikut ini akan dijabarkan beberapa potensi pembangunan perkebunan yang secara umum berkaitan dengan kondisi sumber daya alam, lahan dan air, sumber daya insani, inovasi teknologi, lingkungan, demograf, bahan baku biologi/ benih, sistem informasi manajemen, partisipasi masyarakat, semangat desentralisasi, anggaran, kelembagaan, pasar dan aspek pemerintahan/reformasi birokrasi dalam membangun perkebunan kedepan :

1. Keanekaragaman hayati melimpah sebagai negara tropis
2. Pengembangan bio-economic
3. Peningkatan permintaan dunia terhadap *4F Crops (Food, Feed, Fiber and Fuel)*
4. Kecenderungan baru penghargaan atas jasa lingkungan dan jasa *amenity*
5. Perkembangan inovasi dan ilmu pengetahuan teknologi pertanian/perkebunan
6. Ketersediaan sumber daya lahan dan kesesuaian *agro-ecosystem*
7. Distribusi dan aksesibilitas pemanfaatan sumber daya air
8. Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI)
9. Bonus Demograf
10. Perkembangan struktur, perilaku dan kinerja pasar
11. Momentum gerakan desentralisasi pemerintahan
12. Partisipasi masyarakat pekebun
13. Dinamika tata kelola dan reformasi birokrasi

Tantangan yang akan dihadapi pembangunan perkebunan kedepan dalam ruang lingkup global terutama berkaitan dengan liberalisasi pasar global :

1. Liberalisasi perdagangan global (implikasi pertemuan WTO, APEC, G20 dan kerjasama bilateral/multilateral/regional lainnya)
2. Kondisi perekonomian global yang menimbulkan gejolak harga dunia (implikasi negatif era pasar bebas ASEAN/AEC 2015)

3. Tuntutan terhadap atribut mutu/kualitas produk (implikasi dari tuntutan daya saing komoditas)
4. Perubahan iklim akibat pemanasan global (implikasi terhadap munculnya bencana alam dan peningkatan serangan OPT)
5. Dukungan terhadap optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup (implikasi terhadap pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan).
6. Tingginya tingkat permintaan akibat ledakan jumlah penduduk dan urbanisasi (implikasi terhadap ketersediaan bahan baku)
7. Aspek distribusi/pengangkutan dan pemasaran (implikasi dari globalisasi produksi dan pasar)

Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan lingkup dipersempit dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, yang harus selaras dan sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024. Hal ini berarti bahwa konteks Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkebunan tidak boleh keluar dari koridor Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka **Visi** Direktorat Jenderal Perkebunan adalah :

**“PERKEBUNAN INDONESIA YANG PRODUKTIF, BERNILAI TAMBAH DAN BERDAYA SAING DALAM MEWUJUDKAN PERTANIAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG UNTUK MENDUKUNG TERCAPAINYA VISI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA”**

Visi Direktorat Jenderal Perkebunan diatas pada dasarnya adalah mewujudkan perkebunan Indonesia yang memenuhi 3 (tiga) kata kondisi utama, yaitu **produktif, bernilai tambah dan berdaya saing**. Makna ketiga kondisi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- **Produktif**, berarti bahwa produksi komoditas perkebunan Indonesia semakin meningkat dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun dalam memenuhi kebutuhan ekspor. Peningkatan produksi tentunya dipengaruhi oleh peningkatan produktivitas maupun luas panen tanaman perkebunan nasional.
- **Bernilai tambah** berarti bahwa produk perkebunan Indonesia mampu dihilirisasi, tidak menjual bahan mentah, dan mampu menyajikan produk olahan perkebunan yang mampu meningkatkan harga jual komoditas perkebunan nasional. Peningkatan harga jual ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tukar perkebunan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan pekebun nasional.
- **Berdaya saing** berarti bahwa produk perkebunan nasional mampu bersaing dengan produk impor sejenis maupun produk ekspor sejenis dari negara lain. Dalam konteks impor, jika produk perkebunan nasional berdaya saing, maka jumlah impor produk perkebunan dapat diturunkan baik melalui produk sejenis maupun produk substitut sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sedangkan dalam konteks

ekspor, berdaya saing berarti bahwa produk perkebunan nasional menjadi pilihan utama negara tujuan ekspor dibanding dengan produk perkebunan sejenis yang dimiliki negara lain.

**Misi** Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024 berdasarkan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah :

**“MENINGKATKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN ASAL PERKEBUNAN SERTA KEBUTUHAN EKSPOR KOMODITAS PERKEBUNAN DALAM MEMPERKUAT STRUKTUR EKONOMI YANG PRODUKTIF, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING”**

Misi ini menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan akan fokus dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri serta pemenuhan kebutuhan ekspor luar negeri, dimana Direktorat Jenderal Perkebunan menjadi tulang punggung dalam meningkatkan ekspor pertanian secara keseluruhan. Hal ini dilakukan guna memperkuat struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing sesuai Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024.

Tujuan merupakan penjabaran lebih detil dari visi dan misi Direktorat Jenderal Perkebunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai Visi Direktorat Jenderal tahun 2024. Tujuan Direktorat Jenderal perkebunan tahun 2024 adalah “Terwujudnya Produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing sesuai kepentingan penguatan ekonomi nasional”. Tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator tujuan, yaitu :

1. Pertumbuhan ekspor produk perkebunan nasional (%)
2. Penurunan impor produk perkebunan nasional (%)
3. Nilai reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan menuju birokrasi yang efektif dan efisien

Sasaran program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*). Perumusan sasaran program Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan penerjemahan dari tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan dan pendelegasian dari Kementerian Pertanian. Selain itu, sasaran program Direktorat Jenderal Perkebunan juga merupakan hasil pendelegasian kinerja dari sasaran strategis Kementerian Pertanian, sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Direktorat Jenderal Perkebunan. Sasaran program Direktorat Jenderal Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan
2. Tersedianya sarana perkebunan yang sesuai kebutuhan
3. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman perkebunan
4. Terselenggaranya birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien
5. Terselenggaranya pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas
6. Meningkatnya kualitas layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan

Direktorat Jenderal Perkebunan berupaya untuk mencapai 2 (dua) hasil akhir sebagai bagian kontribusi atas pembangunan pertanian nasional, yaitu pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan yang semakin meningkat serta ekspor produk perkebunan yang semakin meningkat. Kedua hal tersebut akan terwujud apabila produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing dapat terwujud sesuai dengan kepentingan penguatan ekonomi nasional. Terwujudnya atap strategi berupa produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing tersebut tidak lepas dari peran penting keempat pilar strategis Direktorat Jenderal Perkebunan yang saling bersinergi dan terintegrasi.

**Pilar pertama** adalah perbenihan tanaman perkebunan, dimana diharapkan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dapat terwujud. Ketersediaan dan kualitas benih yang memadai akan sangat mempengaruhi produksi tanaman perkebunan.

**Pilar kedua** adalah budidaya tanaman perkebunan, dimana efisiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan *best practice* budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan *Good Agricultural Practice* (GAP).

**Pilar ketiga** adalah pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), dimana perlindungan tanaman perkebunan dari OPT/DPI secara optimal dapat dilakukan guna menurunkan risiko gagal panen karena kematian tanaman akibat OPT/DPI tersebut.

**Pilar keempat** adalah jaminan mutu, dimana peningkatan mutu, keamanan serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan menjadi hal penting yang harus diwujudkan. Hilirisasi produk perkebunan melalui pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta penjaminan mutu dan keamanan pengelolaan perkebunan nasional terintegrasi akan mampu mewujudkan produk perkebunan yang bernilai tambah tinggi sehingga mampu bersaing dengan produk perkebunan dari negara lain.

Berdasarkan arahan strategis Direktur Jenderal Perkebunan dan hasil *focus group discussion* (FGD) dengan pemangku kepentingan, maka dirumuskan sejumlah kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024. Kegiatan merupakan upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mendukung Kementerian Pertanian dalam mencapai visi dan misi Presiden pada sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan, dimana kegiatan yang disusun harus selaras dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024 :

1. Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas tanaman

2. Efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan
3. Efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan
4. Optimasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT sertaantisipasi risiko DPI
5. Peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan
6. Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai *roadmap* reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

### **3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur**

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Perkebunan selama kurun waktu lima tahun ke depan berdasarkan analisis permasalahan yang dihadapi dan isu yang berkembang yang harus di respon serta mempertimbangkan peran langsung sektor perkebunan dalam kerangka pelaksanaan RPJMD 2019-2023 khususnya dalam pencapaian Misi 2 dan secara tidak langsung mendukung pencapaian misi 4. Peran sektor perkebunan dalam mencapai visi dan misi RPJMD 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Merubah pembentukan struktur ekonomi yang berbasis sumberdaya alam yang dapat diperbaharui.
2. Mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah di Kalimantan Timur.
3. Penciptaan aktivitas ekonomi dan pembukaan akses infrastruktur pekebunan.
4. Menyediakan produk komoditas-komoditas unggulan sebagai bahan baku industri hilir dalam menciptakan nilai tambah.
5. Menciptakan sistem ekonomi kerakyatan melalui mengembangkan usaha perkebunan.
6. Pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan melalui pemanfaatan biomassa yang berlimpah.
7. Memperbaiki kualitas lingkungan dan berkontribusi aktif dalam penurunan emisi gas rumah kaca dan perlindungan areal bernilai konservasi tinggi.

Berdasarkan analisis diatas maka ditetapkan **Visi** Dinas Perkebunan tahun 2019-2023 adalah : **"Terwujudnya Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan untuk Mensejahterakan Masyarakat"** dengan 2 misi, yaitu :

1. Meningkatkan daya saing hasil perkebunan untuk memenuhi bahan baku industri dan menunjang ekspor nasional; dan
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembangunan sektor perkebunan yang berkelanjutan.

Visi dan misi tersebut ditetapkan untuk mencapai tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023, sebagai berikut : **"Meningkatkan peran**

**Perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan Perkebunan yang berkelanjutan”.**

Tujuan tersebut diukur dengan indikator nilai absolut PDRB sub sektor perkebunan. Penetapan tujuan tersebut konsisten dan mendukung strategi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk mengurangi dominasi sektor pertambangan/penggalan dan pengolahan migas. Data menunjukkan bahwa di tahun 2017 mencapai 46,31%, sementara sektor pertanian dalam arti luas hanya berkontribusi 7,96% terhadap PDRB Prov. Kaltim dan sub sektor perkebunan berkontribusi 56,46% pada tahun 2017 terhadap sektor pertanian dalam arti luas tersebut maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam periode 2019-2023 terus berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas agar dapat meningkatkan kontribusinya dalam PDRB Kaltim.

Disamping perannya yang semakin besar dalam struktur ekonomi Kalimantan Timur sektor perkebunan diharapkan mampu menyerap tenaga pekebun yang lebih banyak dari tahun 2017 yang berjumlah 337.972 orang. Perkembangan perkebunan di Kalimantan Timur yang didukung oleh kondisi agroklimat dan ketersediaan lahan yang memadai harus mampu meningkatkan produksi dan produktivitas sehingga diharapkan sub sektor perkebunan akan dapat menjadi penopang pusat pertumbuhan ekonomi berbasis energi terbarukan.

Dalam menentukan sasaran dan indikator sasaran Dinas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 memperhatikan kontribusi perkebunan terhadap sasaran pembangunan Daerah seperti pada gambar berikut :

Maka ditetapkan bahwa untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan peran Perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan Perkebunan yang berkelanjutan”** tersebut dicapai dengan sasaran :

1. **Meningkatnya nilai produk sub sektor perkebunan**, dengan indikator :
  - Nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan (miliar rupiah, atas dasar angka konstan)
2. **Meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan**, dengan indikator :
  - Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) (Perusahaan)
3. **Meningkatnya kesejahteraan pekebun**, dengan indikator :
  - NTP Pekebun (%)

Berdasarkan penelaahan tugas dan fungsi serta struktur organisasi tata kerja (SOTK) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, maka ditentukan indikator kinerja utama Dinas Perkebunan Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sebagai ukuran tanggungjawab kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.3.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator serta Target Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir 2023
					2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatkan peran Perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan Perkebunan yang berkelanjutan	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)			4,49	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,3
		Meningkatnya nilai produk sub sektor perkebunan	Nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan (miliar rupiah, atas dasar angka konstan)	15.324	17.544	18.773	20.087	21.493	22.997	22.997
		Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO	38	43	48	53	58	63	63
		Meningkatnya kesejahteraan pekebun	NTP Pekebun (%)	88,45	89	92	95	98	100	100

*Sumber Data : Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023*

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merumuskan strategi dan kebijakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu 2019-2023. Strategi dan kebijakan dimaksud pada dasarnya adalah upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah yang bergerak dalam sub sektor perkebunan.

Adapun Strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah :

1. Mempercepat realisasi pembangunan kebun untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan melalui penataan dan penertiban perijinan di sektor perkebunan;
2. Mengutamakan peningkatan produktivitas daripada perluasan areal perkebunan
3. Memprioritaskan pengembangan komoditas unggulan non sawit (diversifikasi komoditas unggulan) untuk menghindari ketergantungan pada satu komoditas saja yang saat ini di dominasi oleh kelapa sawit;
4. Perluasan kebun baru diarahkan pada pengembangan kebun rakyat dan dilakukan pada lahan yang memiliki cadangan karbon rendah (semak belukar, tanah mineral);
5. Mengembangkan kemitraaan yang saling menguntungkan antara pekebun dan perusahaan perkebunan;
6. Melindungi area cadangan karbon tinggi pada areal perkebunan;
7. Pengembangan dan penguatan kelembagaan Perkebunan;
8. Pengelolaan dan penyediaan data perkebunan berbasis spasial yang transparan dan valid;
9. Peningkatan nilai tambah dan perbaikan harga komoditi Perkebunan rakyat; dan
10. Mendorong pemanfaatan biomassa Perkebunan untuk energi baru terbarukan.

Pelaksanaan Strategi dan kebijakan tersebut diatas dapat efektif dilakukan apabila ada sinergi dan kolaborasi dari berbagai stakeholder, oleh karena itu desiminasi dan sosialisasi Strategi dan Kebijakan ini akan dilakukan secara terus menerus agar dapat dipahami yang pada akhirnya adanya partisipasi aktif masyarakat luas dalam mencapainya melalui pelaksanaan program kegaitan yang secara langsung di desain untuk mencapai tujuan.

**Tabel 3.3.2. Sasaran, Strategi, & Kebijakan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan peran Perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan Perkebunan yang berkelanjutan	1. Meningkatnya nilai produk sub sektor perkebunan	Mengutamakan peningkatan produktivitas dari pada perluasan areal perkebunan	Peningkatan produksi komoditi perkebunan
		Peningkatan nilai tambah dan perbaikan harga komoditi Perkebunan rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produk primer menjadi beberapa produk turunan lainnya</li> <li>• Peningkatan mutu dan nilai tambah produk perkebunan</li> <li>• Peningkatan Pemasaran produk perkebunan dengan standar isasi tinggi dan berorientasi ekspor</li> <li>• Membangun outlet-outlet pemasaran produk olahan Perkebunan</li> </ul>
		Memprioritaskan pengembangan komoditas unggulan non sawit (diversifikasi komoditas unggulan)	Mendorong peningkatan luas komoditas non sawit
		Perluasan kebun di arahkan pada pengembangan kebun rakyat dan dilakukan pada lahan yang memiliki cadangan karbon rendah	Peningkatan luasan lahan pada perkebunan rakyat
		Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan Pengelolaan dan penyediaan data perkebunan berbasis spasial yang transparan dan valid	Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana penunjang Peningkatan pengelolaan data dan informasi perkebunan

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
	2. Meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	Mempercepat realisasi pembangunan kebun untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan melalui penataan dan penertiban perijinan di sektor perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan efektivitas pengawasan usaha perkebunan yang berkelanjutan</li> <li>• Melakukan penataan dan penertiban perijinan usaha Perkebunan</li> </ul>
		Melindungi area cadangan karbon tinggi pada areal perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan hama dan penyakit</li> <li>• Efektivitas Mitigasi Emisi GRK</li> <li>• Penanganan lahan berkonservasi tinggi dan pengendalian kebakaran</li> <li>• Peningkatan pemanfaatan limbah biomassa perkebunan</li> </ul>
	3. Meningkatnya kesejahteraan pekebun	Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan antara pekebun dan perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dan kebun kemitraan</li> <li>• Penanganan konflik perkebunan</li> </ul>
		Peningkatan nilai tambah dan perbaikan harga komoditi Perkebunan rakyat	Memperpendek mata rantai pemasaran produk perkebunan rakyat

Sumber Data : Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN STRATEGIS**

Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan keruangan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Perencanaan pembangunan berbasis keruangan akan memperhatikan posisi *bergaining power* suatu kebijakan. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang perlu diperhatikan untuk mengendalikan setiap prgoram kegiatan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah agar keberlanjutan ekosistem yang tertata dapat dijaga.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD.

Perumusan dokumen perencanaan pembangunan masih perlu disinergikan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan subsektor perkebunan menjadi salah satu ujung tombak penciptaan *green economy* yang selaras dengan isu-isu lingkungan hidup. Penerapan KLHS dalam penataan ruang wilayah bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya. Selain itu, penerapan kajian lingkungan hidup tersebut dapat menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan berkelanjutan dengan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan.

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Dalam penyusunan suatu dokumen perencanaan strategis, perlu dianalisa keterkaitan antara kebijakan dengan pengendalian pengembangan suatu wilayah secara terpadu dan terintegrasi. Analisis ini akan menghasilkan sebuah sinkronisasi awal terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dimana penataan ruang suatu wilayah akan menjadi pendukung pembangunan daerah.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sara yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan pedesaan dalam wilayah pelayanannya an jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

1. Rencana struktur wilayah kabupaten berfungsi :
  - a. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
  - b. Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterakitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

2. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan :
  - a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
  - b. Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi;
  - c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan
  - d. Ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria :
  - a. Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi, dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
  - b. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;
  - c. Pusat-pusat permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut :
    - Terdiri atas pusat pelayanan kawasan (PPK), pusat pelayanan lingkungan (PPL), serta pusat kegiatan lain yang berhirarki lebih tinggi yang berada di wilayah kabupaten yang kewenangan penentuannya ada pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
    - Memuat penempatan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL); dan
    - Harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem wilayah kabupaten.
  - d. Dapat memuat pusat-pusat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai PKL (dengan notasi PKLp);
    - Pusat kegiatan yang dapat ditetapkan menjadi PKLp hanya pusat pelayanan kawasan (PPK); dan
    - Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya di dalam arahan pemanfaatan ruangnya, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL.
  - e. Sistem jaringan prasarana kabupaten dibentuk oleh sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan

keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

Mengacu pada pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten (Permen PU No 16 Tahun 2009), Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, terdiri atas :

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah kabupaten;
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di wilayah kabupaten;
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah kabupaten;
4. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang berada di wilayah kabupaten;
5. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu :
  - a. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan
  - b. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Dengan menggunakan ketentuan tersebut, maka pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi Kalimantan Timur menetapkan :

1. PKN berupa Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang;
2. PKL meliputi :
  - a. Perkotaan Kota Bangun;
  - b. Perkotaan Muara Badak;
  - c. Perkotaan Muara Jawa;
  - d. Perkotaan Kembang Janggut;
  - e. Perkotaan Samboja; dan
  - f. Perkotaan Tenggarong Seberang.
3. PPK meliputi :
  - a. Perkotaan Sanga-Sanga;
  - b. Perkotaan Loa Janan;
  - c. Perkotaan Loa Kulu;
  - d. Perkotaan Muara Muntai;
  - e. Perkotaan Muara Wis
  - f. Perkotaan Sebulu;
  - g. Perkotaan Anggana;
  - h. Perkotaan Marang Kayu;
  - i. Perkotaan Muara Kaman;
  - j. Perkotaan Kenohan; dan
  - k. Perkotaan Tabang.

**Tabel 3.4.1. Sistem dan Fungsi Perkotaan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara**

<b>NO</b>	<b>PUSAT KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>FUNGSI</b>
1.	PKN	Perkotaan - Balikpapan - Tenggarong - Samarinda - Bontang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Pengolahan Migas</li> <li>• Pusat Pengolahan Batu Bara</li> <li>• Pusat Pemerintahan Kabupaten</li> <li>• Pusat Perdagangan Regional</li> <li>• Pusat Koleksi dan Distribusi Barang Regional</li> <li>• Pusat Pengembangan Perkebunan Sawit dan Pengolahan Hasil Sawit</li> </ul>
2.	PKL	Kota Bangun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai Pusat Pendukung Kegiatan PKN Tenggarong</li> </ul>
		Muara Badak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai Pusat Pendukung Kegiatan PKSN Samarinda</li> </ul>
		Muara Jawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai Pusat Pendukung Kegiatan PKSN Samarinda dan PKN Balikpapan</li> </ul>
		Kembang Janggut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai Pusat Pendukung Kegiatan PKSN Long Pahangai</li> </ul>
		Samboja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Pelayanan Perkotaan</li> <li>• Pusat Transportasi Regional dan Lokal</li> <li>• Pusat Pengembangan Pertanian</li> <li>• Pusat Pelayanan Pariwisata</li> <li>• Pusat Pelayanan Industri, Jasa Perdagangan Terbatas</li> </ul>
		Tenggarong Seberang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Pelayanan Perkotaan</li> <li>• Pusat Transportasi Regional dan Lokal</li> <li>• Pusat Pengembangan Pertanian</li> <li>• Pusat Pelayanan Pariwisata</li> <li>• Pusat Pelayanan Industri, Jasa Perdagangan Terbatas</li> </ul>
3.	PPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanga-Sanga</li> <li>• Loa Janan</li> <li>• Loa Kulu</li> <li>• Muara Muntai</li> <li>• Muara Wis</li> <li>• Sebulu</li> <li>• Anggana</li> <li>• Marang Kayu</li> <li>• Muara Kaman</li> <li>• Kenohan</li> <li>• Tabang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Transportasi Antar Kecamatan dan/Lokal Kecamatan</li> <li>• Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian</li> <li>• Pusat Kegiatan Perikanan</li> <li>• Pusat Pengembangan Industri</li> <li>• Pusat Pelayanan Jasa dan Perdagangan Lokal</li> </ul>

*Sumber Data : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033*

Distribusi pemukiman perdesaan di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan keberagaman yang tinggi yakni ada yang terpusat, terpancar, maupun berdekatan dengan pusat kota. Adapun rencana pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menetapkan 1(satu) atau 3 (tiga) desa yang berpotensi sebagai

pusat pertumbuhan bagi desa sekitarnya dengan fungsi pelayanan kegiatan antar lingkungan dan antar desa.

Kabupaten Kutai Kartanegara yang secara Geografis terletak di daerah Khatulistiwa dengan posisi antara 115° 26' 28" BT dan 1° 08' 06" LS, secara administratif mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar dan Kabupaten Kutai Timur serta Kota Samarinda.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat.

Luas Wilayah 27.263,10 Km<sup>2</sup> atau 13,28 % dari luas Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari 18 Kecamatan dan 227 Desa / Kelurahan.

Pusat Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara berada di Tenggarong dan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu maka Wilayah Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi atas 3 (tiga) wilayah pembangunan terpadu (WPT) yaitu :

1. **Wilayah I (Pesisir)** terdiri dari Kecamatan : Samboja, Muara Jawa, Sanga sanga, Anggana, Muara Badak, dan Marang Kayu dengan Pusat Pelayanan berada di Kecamatan Muara Jawa dan Muara Badak.
2. **Wilayah II (Tengah)** terdiri dari Kecamatan : Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Sebulu, dan Muara kaman dengan Pusat Pelayanan berada di Tenggarong.
3. **Wilayah III (Hulu)** terdiri dari Kecamatan : Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai, Kahala, Kembang Janggut dan Tabang dengan pusat Pelayanan berada di Kota bangun.

Sebagian Besar Topografi wilayah bergelombang dengan ketinggian tempat antara 25-500 m dpl, dengan dominasi jenis tanah aluvial dan podsolik merah kuning.

Pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan dari program dan kegiatan perkebunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dan merupakan bagian dari pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara secara keseluruhan. Keberhasilan yang dicapai selama ini terlihat dari semakin berkembangnya luas areal produksi perkebunan serta kelompok tani yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten dengan komoditi andalan Kelapa Sawit, Karet, Lada, dan Kelapa serta Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Adapun pengembangan komoditi unggulan tanaman perkebunan dalam rangka mendukung pengembangan Kawasan Unggulan Ekonomi (KUE) meliputi :

## **Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

1. Tanaman Kelapa Sawit dengan sebaran pada wilayah :
  - a. Kecamatan Kota Bangun
  - b. Kecamatan Loa Kulu
  - c. Kecamatan Muara Badak
  - d. Kecamatan Marang Kayu
  - e. Kecamatan Tenggarong
  - f. Kecamatan Sebulu
  - g. Kecamatan Muara Jawa
  - h. Kecamatan Samboja
  - i. Kecamatan Loa Janan
  - j. Kecamatan Kembang Janggut
  - k. Kecamatan Tabang
2. Tanaman Karet dengan sebaran pada wilayah :
  - a. Kecamatan Marang Kayu
  - b. Kecamatan Muara Badak
  - c. Kecamatan Samboja
  - d. Kecamatan Loa Janan
  - e. Kecamatan Muara Jawa
  - f. Kecamatan Kota Bangun
3. Tanaman Lada dengan sebaran pada wilayah :
  - a. Kecamatan Loa Janan
  - b. Kecamatan Samboja
  - c. Kecamatan Muara Badak
4. Tanaman Kelapa Dalam dengan sebaran pada wilayah :
  - a. Kecamatan Samboja
  - b. Kecamatan Muara Jawa
  - c. Kecamatan Marang Kayu
5. Tanaman Kopi dengan sebaran pada wilayah :
  - a. Kecamatan Muara Jawa
  - b. Kecamatan Samboja
6. Tanaman Kakao dengan sebaran pada wilayah :
  - a. Kecamatan Muara Kaman
  - b. Kecamatan Kembang Janggut
7. Tanaman Arendengan sebaran pada wilayah :
  - a. Kecamatan Muara Kaman
  - b. KecamatanLoa Janan
  - c. KecamatanKota Bangun

Selaras dengan visi dan misi dari Gerbang Raja, Pembangunan Perkebunan yang mengarah kepada kelanjutan dan peningkatan pembangunan pemberdayaan seluruh komponen yang ada dalam rangka pemanfaatan potensi sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan untuk memperhatikan dan berpihak pada kepentingan rakyat kecil dan rakyat pedesaan. Merupakan kelompok masyarakat yang wajib mendapat prioritas untuk diberdayakan dan dimandirikan secara ekonomi maupun sosial menuju masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

### **3.4.2. Telaahan Pola Ruang Wilayah**

Rencana pola ruang wilayah kabupaten pada dasarnya merupakan rancangan distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten berfungsi sebagai :

1. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dan wilayah kabupaten;
2. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka panjang menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
4. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

Rencana pola ruang untuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dirumuskan berdasarkan kriteria :

1. Merujuk pada rencana pola yang ditetapkan dalam RTRW Nasional, yang tertuang dalam PP No. 26 Tahun 2008;
2. Merujuk pada rencana pola yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031;
3. Mengakomodasikan kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan;
4. Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
5. Mempertimbangkan hasil dari analisis kesesuaian lahan untuk fungsi lindung sesuai dengan Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung.
6. Mengacu pada klasifikasi pada ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya, seperti yang disarikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.4.2. Klasifikasi Pola Ruang Wilayah Kabupaten**

No	Klasifikasi Kawasan	Perincian Kawasan
<b>A. Kawasan Lindung</b>		
1.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kawasan Hutan Lindung</li><li>• Kawasan Resapan Air</li><li>• Kawasan Bergambut</li></ul>

No	Klasifikasi Kawasan	Perincian Kawasan
2.	Kawasan perlindungan setempat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sempadan Pantai</li> <li>• Sempadan Sungai</li> <li>• Kawasan Sekitar Danau atau Waduk</li> <li>• Kawasan Sekitar Mata Air</li> <li>• Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal Lainnya</li> <li>• Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan</li> </ul>
3.	Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suaka Alam</li> <li>• Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya</li> <li>• Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut</li> <li>• Cagar Alam dan Cagar Alam Laut</li> <li>• Kawasan Pantai Berhutan Bakau</li> <li>• Taman Nasional dan Taman Nasional Laut</li> <li>• Taman Hutan Raya</li> <li>• Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut</li> <li>• Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan</li> </ul>
4.	Kawasan rawan bencana alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Rawan Tanah Longsor</li> <li>• Kawasan Rawan Gelombang Pasang</li> <li>• Kawasan Rawan Banjir</li> </ul>
5.	Kawasan Lindung Geologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Cagar Alam Geologi</li> <li>• Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi</li> <li>• Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah</li> </ul>
6.	Kawasan Lindung Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cagar Biosfer, Ramsar, dan Taman Buru</li> <li>• Kawasan Perlindungan Plasma-Nuflora</li> <li>• Kawasan Pengungsian Satwa</li> <li>• Terumbu Karang</li> <li>• Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa atau Biota Laut yang Dilindungi</li> </ul>
<b>B. Kawasan Budidaya</b>		
1.	Kawasan peruntukan hutan produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hutan Produksi Terbatas (HPT)</li> <li>• Hutan Produksi Tetap (HP)</li> <li>• Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)</li> </ul>
2.	Kawasan hutan rakyat	
3.	Kawasan peruntukan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Pertanian Lahan Basah</li> <li>• Kawasan Pertanian Lahan Kering</li> <li>• Kawasan Hortikultura</li> <li>• Kawasan Perkebunan</li> <li>• Kawasan Perternakan</li> </ul>
4.	Kawasan peruntukan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Perikanan Tangkap</li> <li>• Kawasan Budidaya Perikanan</li> <li>• Kawasan Pengolahan Ikan</li> </ul>
5.	Kawasan peruntukan pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Mineral dan Batubara</li> <li>• Kawasan Minyak dan Gas Bumi</li> <li>• Kawasan Panas Bumi, serta Air Tanah di Kawasan Pertambangan</li> </ul>

No	Klasifikasi Kawasan	Perincian Kawasan
6.	Kawasan peruntukan industri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Industri Besar</li><li>• Industri Menengah</li><li>• Industri Kecil dan Mikro</li></ul>
7.	Kawasan peruntukan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kawasan Budaya</li><li>• Kawasan Alam</li><li>• Kawasan Buatan</li></ul>
8.	Kawasan peruntukan permukiman	<ul style="list-style-type: none"><li>• Permukiman Perdesaan</li><li>• Permukiman Perkotaan</li></ul>
9.	Kawasan peruntukan lainnya	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kawasan HANKAM</li><li>• Kawasan Lainnya.</li></ul>

*Sumber Data : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033*

### **3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Bertitik tolak dari permasalahan utama di sektor perkebunan yang telah diuraikan di atas, dirumuskan isu-isu strategis dan mendasar dalam pembangunan perkebunan yang harus tertangani dalam periode 2021-2026, yaitu sebagai berikut :

#### **1. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)**

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi daya dukung percepatan pembangunan perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dimana dipastikan akan terjadi peningkatan kebutuhan terhadap komoditas perkebunan dalam mendukung pembangunan IKN itu sendiri, seperti kebutuhan komoditi lada, kelapa dalam, kopi, kakao dan aren.

#### **2. Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Dan Andalan Perkebunan**

Peningkatan produktivitas perkebunan dilakukan melalui pengembangan dan intensifikasi tanaman perkebunan yang dititikberatkan pada komoditas unggulan dan andalan berbasis kawasan secara terintegrasi, mulai dari kepastian ketersediaan lahan, penyiapan petani unggul dan dukungan sarana, prasarana dan infrastuktur wilayah. Dimana komoditi yang menjadi komoditi unggulan perkebunan adalah kelapa sawit, karet, lada dan kelapa dalam, sedangkan komoditi andalan perkebunan adalah kopi, kakao dan aren. Disamping juga melakukan peningkatan perlindungan tanaman, dan penanggulangan bencana serta gangguan usaha perkebunan.

#### **3. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkebunan**

Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan melalui peningkatan pengawasan dan pembinaan bagi perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan luas kebun inti dan plasma dari luas lahan IUP yang telah diterbitkan di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 678.980 Ha.

#### **4. Penguatan Kelembagaan, Kemitraan Dan Peningkatan Mutu Serta Nilai Tambah Produk Perkebunan**

Penguatan kelembagaan, kemitraan dan peningkatan mutu serta nilai tambah produk perkebunan dilakukan melalui penguatan penyuluhan perkebunan dalam melakukan pendampingan kepada pekebun dan pengembangan pekebun milenial, serta pengembangan kemitraan usaha perkebunan dan pengolahan hasil perkebunan.

Keempat isu strategis tersebut memiliki arti penting dalam rangka meningkatkan produksi dan nilai jual hasil perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga bisa mendorong laju pertumbuhan sub sektor perkebunan. Isu strategis tersebut menjadi titik tolak dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan perkebunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

## **IV. TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERKEBUNAN**

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurun waktu lima tahun ke depan berdasarkan analisis permasalahan yang dihadapi dan isu yang berkembang yang harus direspon serta mempertimbangkan peran langsung sektor perkebunan dalam kerangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 khususnya dalam pencapaian  **misi ketiga yang tertuang dalam RPJMD, yaitu memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif**, maka ditetapkanlah tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, yaitu : **“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan”**.

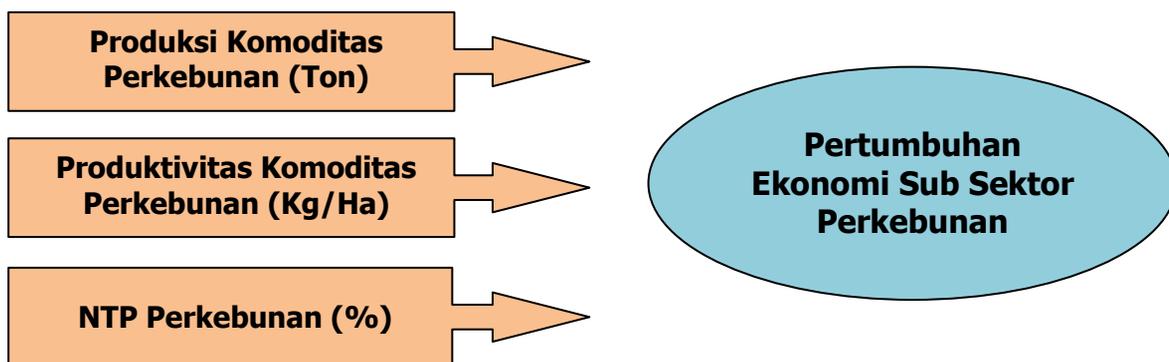
Tujuan tersebut diukur dengan indikator tujuan **“Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan”**, dimana penetapan tujuan tersebut konsisten dan mendukung strategi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengurangi dominasi sektor pertambangan dan penggalian. Data menunjukkan bahwa di tahun 2020 terdapat 4 (empat) sektor dominan yang berpengaruh tinggi terhadap PDRB yaitu sektor Pertambangan (berperan 59,81 persen terhadap perekonomian Kutai Kartanegara), sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan (14,92 persen), sektor Konstruksi (8,56 persen) dan sektor industri pengolahan (4,49 persen). Sedangkan sektor-sektor yang lain secara keseluruhan berperan sebesar 12,22 persen terhadap perekonomian Kutai Kartanegara.

Dalam menentukan sasaran dan indikator sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 memperhatikan pertumbuhan ekonomi sub sektor perkebunan terhadap sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka untuk mencapai tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan dapat dicapai dengan sasaran :

1. Meningkatnya Produksi Komoditas, dengan indikator : Produksi Komoditas Perkebunan (Ton)
2. Meningkatnya Produktivitas Komoditas, dengan indikator : Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kg/Ha)
3. Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun, dengan indikator : NTP Perkebunan (%)

Berdasarkan penelaahan tugas dan fungsi serta struktur organisasi tata kerja (SOTK) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka ditentukan **Indikator Kinerja Utama** Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sebagai ukuran tanggung jawab Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana pada gambar berikut :

**Gambar 4.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026**



Selanjutnya, tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-C.25. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan	1. Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan	Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan	2.20	3.50	3.60	3.80	4.10
			1. Produksi Sawit Rakyat (Ton) *)	267.635	277.032	286.069	294.694	302.874
			2. Produksi Sawit PBS (Ton) *)	2.924.513	3.064.670	3.276.022	3.395.024	3.665.404
			3. Produksi Karet (Ton) *)	9.238	9.616	10.031	10.488	10.992
			4. Produksi Lada (Ton) *)	1.815	2.001	2.207	2.437	2.694
			5. Produksi Kelapa (Ton) *)	2.510	2.706	2.936	3.206	3.525
			6. Produksi Kopi (Ton) **)	8	14	23	40	65
			7. Produksi Kakao (Ton) **)	34	39	48	66	84
			8. Produksi Aren (Ton) **)	392	446	510	584	671
		9. Produksi Kelor (Ton) ***)	6	8	12	13	13	
	2. Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan		1. Produktivitas Sawit Rakyat (Kg/Ha) *)	14.067	14.510	14.931	15.327	15.698
			2. Produktivitas Sawit PBS (Kg/Ha) *)	17.130	17.540	18.330	18.580	19.630
			3. Produktivitas Karet (Kg/Ha) *)	943	978	1.017	1.059	1.106
			4. Produktivitas Lada (Kg/Ha) *)	639	700	768	845	929
			5. Produktivitas Kelapa (Kg/Ha) *)	441	472	509	552	603
			6. Produktivitas Kopi (Kg/Ha) **)	311	420	517	617	767
			7. Produktivitas Kakao (Kg/Ha) **)	681	718	747	806	940
			8. Produktivitas Aren (Kg/Ha) **)	2.658	2.926	3.255	3.637	4.080
			9. Produktivitas Kelor (Kg/Ha) ***)	1.233	1.262	1.371	1.471	1.571
		3. Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun	NTP Perkebunan (%)	98	100	102	104	106

Keterangan :

\*) Komodi Unggulan Perkebunan

\*\*) Komodi Andalan Perkebunan

\*\*\*) Komodi Potensial Perkebunan

Sumber Data : Dinas Perkebunan Kab. Kutai Kartanegara (Hasil Analisis 2021)

Sebagaimana diketahui bahwa kondisi pandemi covid-19 yang melanda sejak bulan Maret 2020 dan masing berlangsung hingga saat ini antara lain telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, dimana laju pertumbuhan ekonomi Kab. Kutai Kartanegara pada tahun 2020 sebesar -4,44 %. Dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah seperti tersebut, maka diperkirakan laju pertumbuhan sub sektor perkebunan (atas dasar harga konddtan) pada tahun 2022 – 2026 ditargetkan pada kisaran 2,20 – 4,50 % per tahun.

Peningatan produksi diharapkan ditopang oleh 4 (empat) komoditas unggulan, yaitu kelapa sawit, karet, lada dan kelapa dalam, terutama dari kelapa sawit yang dihasilkan oleh perusahaan perkebunan. Dengan strategi penngkatan dan optimalisasi pemanfaatan lahan oleh PBS diharapkan realisasi tanam meningkat sehingga produksi tandan buah sawit dari PBS meningkat sebesar 1.286.674 ton TBS dari 2.378.730 pada tahun 2020 ton menjadi 3.665.404 pada tahun 2026.

Nilai Tukar Petani perkebunan rakyat (NTP) sebagai salah satu indikator kesejahteraan pekebun yang pada tahun 2020 berada pada angka 96 ditargetkan meningkat secara bertahap dan pada tahun 2026 ditargetkan NTP mencapai 106. Nilai NTP yang menggambarkan pekebun meningkat kesejahteraannya adalah apabila nilai NTP-nya lebih dari 100. Upaya meningkatkan nilai NTP tidak saja dilakukan melalui intervensi terhadap produksi (*on farm*) dan hasil produksi tetapi juga melalui intervensi dari sisi input produksi, oleh karena itu keterlibatan instansi terkait dalam pengendalian harga input produksi sangat diperlukan.

## **V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Selain itu, strategi merupakan alat metode penghubung antara tujuan dan arah kebijakan organisasi sekaligus cara untuk mewujudkan sasaran dengan rancangan secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program, dan strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, strategi tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses penyusunan Renstra sehingga strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan rencana strategis yang efektif.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan strategis serta pencapaian tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Adapun strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 adalah :

1. Mengembangkan komoditas unggulan dan andalan berbasis kawasan dan korporasi
2. Meningkatkan perlindungan perkebunan
3. Memperkuat penyuluhan dan pendampingan kepada pekebun
4. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan

Pelaksanaan strategi dan kebijakan tersebut diatas dapat efektif dilakukan apabila ada sinergi dan kolaborasi dari berbagai stakeholder, oleh karena itu desiminasi dan sosialisasi strategi dan kebijakan ini akan dilakukan secara terus menerus agar dapat dipahami yang pada akhirnya adanya partisipasi aktif masyarakat luas dalam mencapainya melalui pelaksanaan program kegaitan yang secara langsung di desain untuk mencapai tujuan. Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia								
Misi III : Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan	1. Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan	1. Mengembangkan komoditas unggulan dan andalan berbasis kawasan dan koorporasi	1. Penyediaan reviw rencana aksi pengembangan komoditas unggulan dan andalan perkebunan berbasis kawasan dan koorporasi	√				
			2. Pengembangan dan intensifikasi tanaman perkebunan yang dititikberatkan pada komoditas unggulan dan andalan berbasis Kawasan secara terintegrasi, mulai dari kepastian ketersediaan lahan, penyiapan petani unggul dan dukungan sarana, prasarana dan infratsruktur wilayah	√	√	√	√	√
	2. Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan	1. Meningkatkan perlindungan perkebunan	1. Peningkatan perlindungan tanaman serta penanggulangan bencana dan gangguan usaha perkebunan	√	√	√	√	√
			2. Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha perkebunan	√	√	√	√	√
	3. Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun	1. Memperkuat penyuluhan dan pendampingan kepada pekebun	1. Peningkatan penyuluhan perkebunan dan pengembangan pekebun milenial	√	√	√	√	√
			2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan	1. Pengembangan kemitraan usaha perkebunan yang produktif dan sehat dan pengolahan hasil perkebunan	√	√	√	√

Sumber Data : Hasil Analisis (2021)

Sejalan dengan Program Dedikasi dan Proyek Strategis KUKAR IDAMAN, dalam mewujudkan sasaran “Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan”, ditetapkan strategi pembangunan perkebunan dalam 5 (lima) tahun kedepan, yaitu mengembangkan komoditas unggulan dan andalan berbasis kawasan dan korporasi. Dalam mendukung Program Dedikasi KUKAR IDAMAN tersebut, Dinas Perkebunan akan berbagi peran dengan OPD terkait lainnya, yaitu Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pada “Program Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan”, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara diamanatkan untuk menetapkan kawasan-kawasan strategis pertanian (dalam arti luas) secara terintegrasi, mulai dari kepastian ketersediaan lahan, pengairan, penyiapan petani unggul hingga sarana dan prasarana dan infrastuktur wilayah (jalan dan angkutan umum). Dengan kegiatan prioritas membangun 120 unit embung skala kecil dan 120 Km Jalan Usaha Tani pertanian/perkebunan selama periode kepemimpinan, Kerjasama produktif pertanian dengan membentuk unit usaha pertanian pada Perusda, Pembentukan BUM Desa Unit Usaha Pertanian serta Koperasi Petani yang sehat dan produktif, serta pembinaan pekebun milenial unggul.

Berdasarkan telaahan eksisting, potensi pengembangan dan amanat peraturan perundang-undangan, maka ditetapkan “**Kawasan Unggulan Komoditas Perkebunan dan Kawasan Andalan Komoditas Perkebunan** yang akan dilaksanakan Dinas Perkebunan Tahun 2021-2026, dimana untuk “**Kawasan Unggulan Komoditas Perkebunan**” dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.2. Kondisi Eksisting Kawasan Unggulan Komoditas Perkebunan Tahun 2020**

No	Kawasan Unggulan	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	KK
1	Kelapa Sawit 1 (BANGJOHAN)	Kem. Janggut	6,059	55,146	13,121	1,794
		Kenohan	475	3,596	11,019	187
		Tabang	1,451	17,372	11,200	585
	Jumlah		7,985	76,113	12,021	2,566
2	Kelapa Sawit 2 (MARDAKNA)	Marang Kayu	2,219	16,241	10,871	726
		Muara Badak	4,876	23,578	17,210	2,955
		Anggana	449	4,756	16,288	280
	Jumlah		7,544	44,574	14,124	3,961
3	Karet 1 (MARDAKNA)	Marang Kayu	4,341	3,760	1,248	1,897
		Muara Badak	2,376	1,566	1,359	1,160
		Anggana	1,007	428	988	309
	Jumlah		7,724	5,754	1,252	3,366
4	Karet 2 (KOWISTA)	Kota Bangun	1,935	336	675	452
		Muara Wis	341	221	720	175
		Muara Muntai	775	181	565	440
	Jumlah		3,051	738	656	1,067

**Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	Kawasan Unggulan	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	KK
5	Lada (LOBASA)	Loa Janan	2,857	1,494	600	1,170
		Muara Badak	358	214	941	320
		Samboja	450	113	320	367
Jumlah			3,665	1,821	593	1,857
6	Kelapa Dalam (MASAMBA)	Muara Jawa	1,799	486	400	1,146
		Samboja	2,148	1,243	678	752
		Muara Badak	164	79	709	273
Jumlah			4,111	1,807	572	2,171

Sumber Data : Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (2020)

Sedangkan untuk "Kawasan Andalan Komoditas Perkebunan" dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.3. Kondisi Eksisting Kawasan Andalan Komoditas Perkebunan Tahun 2010**

No	Kawasan Andalan	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	KK
1	Kopi	Loa Kulu	3	0,49	245	3
		Tenggarong	2	0,80	400	15
		Sebulu	11	2,35	782	12
		Muara Jawa	5	0,50	100	5
		Samboja	15	0,60	120	46
		Loa Janan	23	0,97	121	31
		Marang Kayu	2	0,12	60	1
Jumlah			59	4,67	233	112
2	Kakao	Loa Kulu	30	23,33	972	23
		Kota Bangun	1,5	0,59	1,176	5
		Kem. Janggut	16	3,15	450	13
		Kenohan	6	1,15	192	8
		Tabang	1	1	500	2
Jumlah			53,5	28,22	752	49
3	Aren	Kenohan	21,5	50,94	3,773	63
		Kota Bangun	17	60,50	6,050	65
		Muara Kaman	106	115,20	1,920	70
		Loa Kulu	26,75	72,63	4,539	22
		Tenggarong	7	26	5,204	36
Jumlah			178,25	325,29	3,113	256

Sumber Data : Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (2020)

Sedangkan untuk "Kawasan Potensial Komoditas Perkebunan" dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.4. Kondisi Eksisting Kawasan Potensial Komoditas Perkebunan Tahun 2010**

No	Kawasan Potensial	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	KK
1	Kelor	Loa Kulu	1	1,2	1.200	20
		Sanga-Sanga	0,5	0,5	1.000	10
Jumlah			1,5	1,7	1,133	30

Sumber Data : Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (2020)

## **VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pada Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka disusun langkah-langkah operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah subsektor perkebunan kurun waktu lima tahun ke depan (tahun 2021-2026) yang dituangkan dalam program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Dalam perumusan perencanaannya, rencana strategi beserta turunannya harus dijabarkan sesuai kebijakan strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026.

Program dan kegiatan pemerintah daerah dalam spesifikasi subsektoral perkebunan merupakan upaya Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengatasi permasalahan dan mengantisipasi isu-isu strategi yang berkembang untuk pencapaian tujuan dan sasaran Renstra maupun pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara. Terdapat dua jenis program dalam pelaksanaan pembangunan yakni program strategis yang merupakan bentuk program atau kegiatan yang merujuk langsung pada sasaran renstra dan program operasional yang dalam penjabarannya tidak dikaitkan secara langsung dengan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Meskipun begitu, keseluruhan program dan kegiatan dalam pengembangan subsektor perkebunan harus diturunkan lebih lanjut ke dalam indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Program merupakan suatu operasionalisasi dari strategi atau kebijakan pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan dengan cakupan teknis lebih mendalam dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau masyarakat. Dalam pelaksanaannya, setiap program harus dikoordinasikan oleh pemerintah daerah agar selalu berada dalam satu koridor pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara global, dalam hal ini sasaran Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Program pembangunan subsektor perkebunan merupakan pelaksanaan atas kebijakan dari strategi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai amanah dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026. Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program maupun kegiatan-kegiatan yang mampu menjawab tantangan pemerintah daerah ke depan sehingga setiap permasalahan dapat diatasi dan isu-isu strategis akan menjadi daya dorong akselerasi pencapaian pembangunan daerah. Setiap program dalam merealisasikan strategi pembangunan memiliki fungsi dan karakter yang berbeda. Meskipun begitu, masing-masing program tersebut akan memiliki muara

## Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

yang sama yakni terwujudnya tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai lembaga yang dipercaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengelolaan subsektor perkebunan.

Berdasarkan strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, maka dirumuskan program-program prioritas beserta kegiatan untuk masing-masing program sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
  - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - 1.4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
  - 1.5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1.6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1.7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan kegiatan :
  - 2.1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
  - 2.2. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan kegiatan :
  - 3.1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
  - 3.2. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan kegiatan :
  - 4.1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
5. Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan kegiatan :
  - 5.1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Penyuluhan Pertanian, dengan kegiatan :
  - 6.1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Dalam Bab VI RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 juga tercantum **Program Dedikasi KUKAR IDAMAN** dan Proyek-Proyek Strategis dalam rangka implementasi Program Dedikasi KUKAR IDAMAN tersebut. Project strategis pembangunan daerah merupakan proyek-proyek yang memiliki daya ungkit untuk

## Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

menyukkseskan pencapaian visi, misi, program Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, dimana setiap proyek strategis daerah harus dipastikan sumber pendanaannya agar terjamin. Adapun program dan proyek strategis yang merupakan bagian dari pelaksanaan Misi ke-3 dan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

- (1) Pembangunan pertanian berbasis kawasan;
- (2) Hilirisasi produk pertanian.

Pembangunan pertanian sub sektor perkebunan berbasis kawasan telah dijabarkan dalam bagian sebelumnya Renstra ini, dengan proyek strategis yang akan dilaksanakan meliputi :

- (1) Pembangunan kawasan sentra pertanian komoditas perkebunan;
- (2) Pembangunan embung/check dam perkebunan; dan
- (3) Pembangunan jalan produksi perkebunan

Ketiga proyek strategis tersebut di atas telah diintegrasikan ke dalam program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, yaitu pembangunan kawasan sentra pertanian komoditas perkebunan diintegrasikan ke dalam Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, serta pembangunan embung/check dam dan pembangunan jalan produksi diintegrasikan ke dalam Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.

Dalam Program Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara juga diamanatkan untuk membangun 20 Unit Embung dan 20.000 Meter Jalan Produksi Perkebunan, serta Pembentukan Badan Usaha Milik Petani sebanyak 9 Lembaga. Adapun sebaran calon lokasi rencana Pembangunan Embung dan Jalan Produksi Perkebunan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 6.1. Sebaran Rencana Calon Lokasi Pembangunan Embung dan Jalan Produksi Perkebunan Tahun 2022-2026**

No	Kegiatan	Kecamatan	Target
1	Pembangunan Embung	1) Marang Kayu	2 Unit
		2) Muara Badak	1 Unit
		3) Samboja	2 Unit
		4) Loa Janan	2 Unit
		5) Tenggarong	1 Unit
		6) Sebulu	8 Unit
		7) Muara Kaman	2 Unit
		8) Muara Muntai	2 Unit
<b>Jumlah</b>			<b>20 Unit</b>
2	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	1) Marang Kayu	3.000 Meter
		2) Muara Badak	3.300 Meter
		3) Anggana	600 Meter
		4) Muara Jawa	1.000 Meter
		5) Samboja	4.000 Meter

**Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	Kegiatan	Kecamatan	Target
		6) Kembang Janggut	2.100 Meter
		7) Kenohan	1.000 Meter
		8) Muara Muntai	1.000 Meter
		9) Loa Janan	1.000 Meter
		10) Sebulu	2.000 Meter
		11) Muara Kaman	1.000 Meter
<b>Jumlah</b>			<b>20.000 Meter</b>

Sumber Data : Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (2021)

Dalam Pembangunan 20 Unit Embung dan 20.000 Meter Jalan Produksi Perkebunan, selain memanfaatkan sumber dana dari APBD II Kabupaten Kutai Kartanegara, juga menggunakan sumber dana dari BANKEU Provinsi Kalimantan Timur dan DAK, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 6.2. Rencana Sumber Pendanaan Pembangunan Embung dan Jalan Produksi Perkebunan Tahun 2022-2026**

No	Kegiatan	Sumber Dana	Tahun					Jumlah
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Pembangunan Embung	APBD II	3	2	2	2	1	10
		DAK	0	2	2	3	3	10
	<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>20</b>
2	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	APBD I	1.600	1.600	2.000	2.000	2.800	10.000
		BANKEU	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
		DAK	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	<b>Jumlah</b>		<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.800</b>	<b>20.000</b>

Sedangkan sebarang rencana calon lokasi untuk Pembentukan Badan Usaha Milik Petani tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 6.3. Sebaran Rencana Calon Lokasi Pembentukan Badan Usaha Milik Petani Tahun 2022-2026**

No	Komoditi	Lembaga Pekebun	Kecamatan
1	Karet	2 Unit Pengolahan & Pemasaran Bokar	Marang Kayu, Kota Bangun
2	Lada	1 Unit Pengolahan & Pemasaran Lada	Muara Badak
3	Kelapa Dalam	1 Unit Pengolahan & Pemasaran Kelapa Dalam	Samboja
4	Kopi	2 Unit Pengolahan & Pemasaran Kopi	Loa Kulu, Marang Kayu
5	Kakao	1 Unit Pengolahan & Pemasaran Kakao	Kembang Janggut
6	Aren	1 Unit Pengolahan & Pemasaran Aren	Kota Bangun
7	Kelor	1 Unit Pengolahan & Pemasaran Kelor	Loa Kulu
<b>Jumlah</b>		<b>9 Lembaga</b>	

Sumber Data : Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (2021)

Sedangkan sebaran rencana calon lokasi untuk Pembinaan Pekebun Milenial Unggul, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 6.4. Sebaran Rencana Calon Lokasi Pembinaan Pekebun Milenial Unggul**

No	Kecamatan	Target	No	Kecamatan	Target
1	Marang Kayu	7 Pekebun	11	Muara Kaman	9 Pekebun
2	Muara Badak	7 Pekebun	12	Tenggarong Sbrang	7 Pekebun
3	Anggana	9 Pekebun	13	Kota Bangun	9 Pekebun
4	Sanga-Sanga	8 Pekebun	14	Muara Wis	9 Pekebun
5	Muara Jawa	9 Pekebun	15	Muara Muntai	9 Pekebun
6	Samboja	9 Pekebun	16	Kembang Janggut	10 Pekebun
7	Loa Janan	9 Pekebun	17	Kenohan	9 Pekebun
8	Loa Kulu	7 Pekebun	18	Tabang	7 Pekebun
9	Tenggarong	7 Pekebun			
10	Sebulu	9 Pekebun			
				<b>Jumlah</b>	<b>150 Pekebun</b>

Sumber Data : Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (2021)

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara juga turut mendukung "Program Dedikasi KUKAR IDAMAN" melalui "Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN", Berupa Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perkebunan, dengan mengacu pada Basis Data Terpadu Kemiskinan. Adapun Target Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2021 s/d 2026 sebanyak 366 Pekebun Miskin, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 6.5. Sebaran Rencana Calon Lokasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perkebunan**

No	Kecamatan	Target	No	Kecamatan	Target
1	Muara Badak	24 Pekebun	9	Muara Muntai	2 Pekebun
2	Loa Janan	44 Pekebun	10	Sebulu	10 Pekebun
3	Anggana	11 Pekebun	11	Kenohan	34 Pekebun
4	Sangasanga	3 Pekebun	12	Muara Kaman	10 Pekebun
5	Marang Kayu	101 Pekebun	13	Muara Jawa	8 Pekebun
6	Samboja	51 Pekebun	14	Muara Wis	2 Pekebun
7	Loa Kulu	9 Pekebun			
8	Kembang Janggut	52 Pekebun			
				<b>Jumlah</b>	<b>361 Pekebun</b>

Sumber Data : Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (2021)

Untuk lebih jelasnya, secara lengkap Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada table T-C-27 berikut ini, dimana terdapat beberapa sub kegiatan dengan pagu yang dianggarkan flat, disebabkan karena menyesuaikan dengan proyeksi kemampuan pagu daerah.

Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3.27.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77.00	77.50	28,167,507,862	78.00	29,717,757,862	78.50	29,744,257,862	79.00	31,128,457,862	79.50	30,989,257,862	79.50	149,747,239,309	Sekretariat	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	9	640,274,000	9	640,274,000	9	640,274,000	9	640,274,000	9	640,274,000	45	3,201,370,000		
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	3	320,898,000	3	320,898,000	3	320,898,000	3	320,898,000	3	320,898,000	15	1,604,490,000	Subbag. Peny. Program & Keuangan	Dalam dan Luar Daerah
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2	2	84,000,000	2	84,000,000	2	84,000,000	2	84,000,000	2	84,000,000	10	420,000,000	Subbag. Peny. Program & Keuangan	18 Kecamatan
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	235,376,000	4	235,376,000	4	235,376,000	4	235,376,000	4	235,376,000	20	1,176,880,000	Subbag. Peny. Program & Keuangan	Dalam dan Luar Daerah
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	15	15	23,542,202,184	15	24,126,073,862	15	24,723,573,862	15	25,339,673,862	15	25,966,263,862	75	123,697,787,631		
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	23,314,082,184	12	23,897,953,862	12	24,495,453,862	12	25,111,553,862	12	25,738,143,862	60	122,557,187,631	Subbag. Peny. Program & Keuangan	18 Kecamatan
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	15	15	228,120,000	15	228,120,000	15	228,120,000	15	228,120,000	15	228,120,000	75	1,140,600,000	Subbag. Peny. Program & Keuangan	18 Kecamatan
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	121,400,000	1	131,660,000	1	131,660,000	1	131,660,000	1	131,660,000	5	648,040,000		
3.27.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan	1	1	81,660,000	1	81,660,000	1	81,660,000	1	81,660,000	1	81,660,000	5	408,300,000	Subbag. Umum & Tatalaksana	18 Kecamatan
3.27.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	Laporan	1	1	39,740,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	5	239,740,000	Subbag. Umum & Tatalaksana	18 Kecamatan

**Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
3.27.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	5	125,000,000		
3.27.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Hasil Penjualan Tanaman Perkebunan	Rupiah	525.974.500	225.000.000	25,000,000	337.500.000	25,000,000	450.000.000	25,000,000	562.500.000	25,000,000	675.000.000	25,000,000	2.250.000.000	125,000,000	Subbag. Peny. Prog. & Keu.	Tenggarong, Kembang Janggut
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	2	253,736,200	2	537,000,000	2	270,000,000	2	537,000,000	2	270,000,000	10	1,867,736,200		
3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Unit	-	-	-	267	267,000,000	0	-	267	267,000,000	0	-	534	534,000,000	Subbag. Kepegawaian	18 Kecamatan
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	21	21	183,736,200	25	200,000,000	25	200,000,000	25	200,000,000	25	200,000,000	121	983,736,200	Subbag. Kepegawaian	Dalam dan Luar Daerah
3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	15	15	70,000,000	15	70,000,000	15	70,000,000	15	70,000,000	15	70,000,000	75	350,000,000	Subbag. Umum & Tatalaksana	Dalam dan Luar Daerah
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	7	7	1,066,974,438	7	1,209,500,000	7	1,255,500,000	7	1,256,600,000	7	1,257,810,000	35	6,046,384,438		
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	6	7	10,000,000	7	10,000,000	7	11,000,000	7	12,100,000	7	13,310,000	35	56,410,000	Subbag. Umum & Tatalaksana	18 Kecamatan
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	26	35	300,000,000	35	350,000,000	35	385,000,000	35	385,000,000	35	385,000,000	175	1,805,000,000	Subbag. Umum & Tatalaksana	18 Kecamatan
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	5	10	26,634,438	10	25,000,000	10	25,000,000	10	25,000,000	10	25,000,000	50	126,634,438	Subbag. Umum & Tatalaksana	18 Kecamatan
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1. Buku 2. Lembar 3. Buah	3	3	55,020,000	5	65,000,000	5	70,000,000	5	70,000,000	5	70,000,000	23	330,020,000	Subbag. Umum & Tatalaksana	18 Kecamatan
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	Eksemplar	3,000	3,600	29,820,000	5,400	54,500,000	5,400	54,500,000	5,400	54,500,000	5,400	54,500,000	25,200	247,820,000	Subbag. Umum & Tatalaksana	18 Kecamatan
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Orang/Kali	550	460	545,500,000	500	605,000,000	500	610,000,000	500	610,000,000	500	610,000,000	2,460	2,980,500,000	Subbag. Umum & Tatalaksana	Dalam dan Luar Daerah
3.27.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	Berkas	1,352	1,352	100,000,000	1,352	100,000,000	1,352	100,000,000	1,352	100,000,000	1,352	100,000,000	6,760	500,000,000	Subbag. Umum & Tatalaksana	18 Kecamatan

**Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	-	-	9	360,000,000	-	-	1	500,000,000	-	-	10	860,000,000			
3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Diadakan	Unit	-	-	9	360,000,000	-	-	1	500,000,000	-	-	10	860,000,000	Subbag. Umum & Tatalaksana	Tenggarong	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	1,947,256,980	12	1,988,250,000	12	1,998,250,000	12	1,998,250,000	12	1,998,250,000	60	9,930,256,980			
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	349,006,972	12	380,000,000	12	385,000,000	12	385,000,000	12	385,000,000	60	1,884,006,972	Subbag. Umum & Tatalaksana	18 Kecamatan	
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	80,000,000	12	90,000,000	12	95,000,000	12	95,000,000	12	95,000,000	60	455,000,000	Subbag. Umum & Tatalaksana	18 Kecamatan	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	Bulan	12	1,518,250,008	12	1,518,250,000	12	1,518,250,000	12	1,518,250,000	12	1,518,250,000	60	7,591,250,008	Subbag. Kepegawaian	18 Kecamatan	
		2. Jumlah pameran yang diikuti	Kali	2	2	2	2	2	2	2	2	10	-					
		3. Jumlah pengelolaan Website	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	5	-					
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	121	570,664,060	130	700,000,000	130	700,000,000	130	700,000,000	130	700,000,000	624	3,370,664,060			
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Unit	117	400,000,000	127	400,000,000	127	400,000,000	127	400,000,000	127	400,000,000	611	2,000,000,000	Subbag. Umum & Tatalaksana	18 Kecamatan	
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	170,664,060	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	13	1,370,664,060	Subbag. Umum & Tatalaksana	18 Kecamatan	

**Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana-	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
3.27.02	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat	Ha	28,516	28,570	4,425,000,000	28,645	3,842,250,000	28,720	3,375,750,000	28,795	2,154,050,000	28,880	2,288,250,000	28,880	16,085,300,000	1) Bidang Pengembangan & Perbenihan 2) Bidang Produksi		
		2. Luas Areal Kelapa Sawit PBS	Ha	190,797	214,116		237,435		268,526		307,390		346,255		346,255				346,255
		3. Luas Areal Karet	Ha	17,833	17,898		17,928		17,958		17,988		18,033		18,033				18,033
		4. Luas Areal Lada	Ha	3,375	3,402		3,412		3,427		3,442		3,452		3,452				3,452
		5. Luas Areal Kelapa Dalam	Ha	7,261	7,286		7,291		7,301		7,306		7,311		7,311				7,311
		6. Luas Areal Kopi	Ha	72	78		89		110		115		125		125				125
		7. Luas Areal Kakao	Ha	70	80		85		95		95		100		100				100
		8. Luas Areal Aren	Ha	237	237		243		248		248		253		253				253
		9. Luas Areal Kelor	Ha	2	5		7		9		9		9		9				9
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian Yang Diawasi	Paket	65	409	4,175,000,000	303	3,592,250,000	227	3,125,750,000	152	1,904,050,000	193	2,038,250,000	1,284	14,835,300,000			
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Luas pengadaan bibit & herbisida	Ha	3	13	602,000,000	22	706,500,000	37	953,000,000	10	176,500,000	10	176,500,000	92	2,614,500,000	1) Seksi Peng. Areal 2) Seksi Sarana & Prasarana 3) Seksi Alat & Mesin	Kembang Janggut, Kenohan, Tabang, Marang Kayu, Muara Badak, Anggana, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai, Muara Jawa, Samboja, Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong, Sebulu, Muara Kaman, Sangasanga	
		Luas pengadaan pupuk	Ha	42	235	1,226,250,000	181	889,000,000	54	261,500,000	52	251,500,000	76	358,000,000	598	2,986,250,000			
		Jumlah pengadaan alat panen dan pasca panen	Paket	65	61	300,000,000	23	200,000,000	61	314,500,000	26	79,300,000	62	307,000,000	233	1,200,800,000			
		Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapatkan Bantuan	Orang	0	100	1,400,000,000	77	1,200,000,000	75	1,000,000,000	64	800,000,000	45	600,000,000	361	5,000,000,000			
		Luas pemeliharaan Kebun Dinas	Ha	19	17	100,000,000	17	100,000,000	17	100,000,000	17	100,000,000	17	100,000,000	17	500,000,000			
		Jumlah pengadaan benih	Buah	1,500	5,000	396,750,000	5,000	396,750,000	5,000	396,750,000	5,000	396,750,000	5,000	396,750,000	25,000	1,983,750,000			
		Luas Demfarm Tanaman Perkebunan	Ha	0	3	150,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	550,000,000			
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan	Komoditi	-	2	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	6	1,250,000,000			
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan	Komoditi	-	1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	5	625,000,000	Seksi Perbenihan	Kembang Janggut, Kenohan, Loa Kulu, Loa Janan, Samboja, Muara Jawa, Muara Badak, Marang Kayu	

**Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Fasilitas Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Fasilitas	0	1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	5	625,000,000	Seksi Perbenihan	Kembang Janggut, Kenohan, Loa Kulu, Loa Janan, Samboja, Muara Jawa, Muara Badak, Marang Kayu
3.27.03	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	Meter	100,000	3,600	3,315,000,000	3,600	2,347,500,000	4,000	2,737,500,000	4,000	2,625,000,000	4,800	2,680,000,000	20,000	13,705,000,000	1) Bidang Pengembangan & Perbenihan 2) Bidang Produksi	
		2. Jumlah Embung Yang Dibangun	Unit	20	3		4		4		5		4		20			
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan	Dokumen	1	2	350,000,000	1	150,000,000	2	300,000,000	1	150,000,000	2	300,000,000	8	1,250,000,000		
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	Dokumen	1	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	5	750,000,000	Seksi Penyiapan & Pemanfaatan Lahan	18 Kecamatan
3.27.03.2.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Lahan	Dokumen		1	200,000,000		-	1	150,000,000		-	1	150,000,000	3	500,000,000	Seksi Penyiapan & Pemanfaatan Lahan	18 Kecamatan
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	Unit	-	21	2,965,000,000	7	2,197,500,000	7	2,437,500,000	10	2,475,000,000	5	2,380,000,000	50	12,455,000,000		
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Panjang Parit Kebun Yang Direhabilitasi	Meter	-	-	-	1,000	100,000,000	1,000	100,000,000	1,000	100,000,000	1,000	100,000,000	4,000	400,000,000	Seksi Sarana & Prasarana	Muara Jawa, Samboja
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Yang Dibangun	Unit	20	3	1,500,000,000	4	1,000,000,000	4	1,000,000,000	5	1,000,000,000	4	500,000,000	20	5,000,000,000	Seksi Sarana & Prasarana	Marang Kayu, Muara Badak, Samboja, Loa Janan, Tenggarong, Sebulu, Muara Kaman, Muara Muntai

**Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	Meter	100,000	3,600	1,180,000,000	3,600	960,000,000	4,000	1,200,000,000	4,000	1,200,000,000	4,800	1,680,000,000	20,000	6,220,000,000	Seksi Sarana & Prasarana	Marang Kayu, Muara Badak, Anggana, Muara Jawa, Samboja, Loa Janan, Sebulu, Muara Kaman, Muara Muntai, Kembang Janggut, Kenohan
3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Kebun Yang Direhabilitasi	Unit	-	17	285,000,000	2	37,500,000	2	37,500,000	4	75,000,000	-	-	25	435,000,000	Seksi Sarana & Prasarana	Muara Jawa, Samboja
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Unit Pengolah Hasil	Unit	-	1	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	400,000,000	Seksi Sarana & Prasarana	Kenohan, Loa Kulu, Samboja, Marang Kayu
3.27.05	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan	Persen	93.33	86.67	450,000,000	72.00	450,000,000	56.00	450,000,000	38.67	450,000,000	20.00	450,000,000	20.00	2,250,000,000	Bidang Perlindungan	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Luas Pengendalian OPT Dan Bencana Perkebunan	Ha	100	200	450,000,000	220	450,000,000	240	450,000,000	260	450,000,000	280	450,000,000	1,200	2,250,000,000		
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas pengendalian OPT Perkebunan	Ha	40	60	150,000,000	110	150,000,000	120	150,000,000	130	150,000,000	140	150,000,000	560	750,000,000	Seksi Pengamatan & Peng. OPT	18 Kecamatan
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ANKT) dalam areal IUP Perkebunan yang dikelola	Ha	21,550	22,050	150,000,000	22,650	150,000,000	23,200	150,000,000	23,800	150,000,000	24,200	150,000,000	24,200	750,000,000	Seksi Pengendalian Lingkungan	18 Kecamatan
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1. Jumlah Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina 2. Jumlah Gangguan Usaha Perkebunan yang difasilitasi	Kelompok Kasus	10 10	10 10	150,000,000	15 10	150,000,000	15 10	150,000,000	20 10	150,000,000	20 10	150,000,000	80 50	750,000,000	Seksi Pengendalian Lingkungan	18 Kecamatan

**Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
3.27.06	Perizinan Usaha Pertanian	1. Jumlah Penerbitan STDB	Surat (STDB)	200	200	400,000,000	200	250,000,000	200	300,000,000	200	250,000,000	200	250,000,000	1,000	1,450,000,000	Bidang Usaha & Penyuluhan	
		2. Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	Surat (PUP)	21	11		3		20		10		3		47			
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemegang Tanda Daftar Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan Yang Dibina	Pelaku	221	211	400,000,000	203	250,000,000	220	300,000,000	210	250,000,000	203	250,000,000	1,047	1,450,000,000		
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	1. Jumlah pekebun yang mendapatkan STDB	Surat (STDB)	200	200	400,000,000	200	250,000,000	200	300,000,000	200	250,000,000	200	250,000,000	1,000	1,450,000,000	Seksi Pembinaan & Gangguan Usaha	18 Kecamatan
		2. Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	Surat (PUP)	21	11		3		20		10		3		47			
3.27.07	Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persen	1.91	4.77	500,000,000	9.76	650,000,000	14.63	650,000,000	19.62	650,000,000	24.60	600,000,000	24.60	3,050,000,000	Bidang Usaha & Penyuluhan	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Pekebun Milenial yang dibina	Lembaga	22	47	500,000,000	49	650,000,000	48	650,000,000	49	650,000,000	48	600,000,000	241	3,050,000,000		
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1. Jumlah Kelompok Tani yang dibina	Kelompok	18	45	350,000,000	47	400,000,000	46	400,000,000	47	400,000,000	47	400,000,000	232	1,950,000,000	Seksi Penyuluhan	18 Kecamatan
		2. Jumlah Pekebun Milenial yang dibina	Orang	0	10		20		30		40		50		150			
3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Lembaga Pekebun yang Dibentuk/Bermitra	Lembaga	4	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	1	150,000,000	9	750,000,000	Seksi Pengolahan & Pem. Hasil	Marang Kayu, Muara Badak, Samboja, Loa Kulu, Kota Bangun, Kembang Janggut
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Pekebun Peserta Pelatihan Budidaya, Panen/Pasca Panen	Orang	-	-		40	100,000,000	40	100,000,000	40	100,000,000	20	50,000,000	140	350,000,000	Seksi Teknologi & Budidaya	Marang Kayu, Muara Badak, Muara Jawa, Samboja, Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong, Sebulu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kembang Janggut, Kenohan, Tabang
Total						37,257,507,862		37,257,507,862		37,257,507,862		37,257,507,862		37,257,507,862		186,287,539,309		

## **VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam menilai efektivitas suatu program kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dibutuhkan suatu indikator kinerja yang merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki perbedaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD tersebut. Sebagai ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, indikator kinerja merupakan sesuatu yang secara nyata dapat dihitung karena akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi.

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan OPD di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga memiliki penetapan standar pelayanan sebagai cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, indikator kinerja yang digunakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari teknis pengembangan subsektor perkebunan pada perencanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara. Indikator kinerja tersebut dirumuskan dari arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang berhubungan dengan teknis pembangunan berbasis sektor pertanian (khususnya subsektor perkebunan) dengan acuan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara itu sendiri.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya pengukuran kinerja dan penentuan indikator kinerja yang sesuai. Permasalahan tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome, dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya, sedangkan pada bisnis hanya berorientasi pada mata uang sebagai keuntungan usaha. Meskipun begitu, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tetap berusaha optimal untuk menyusun indikator kinerja sebagai landasan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun. Oleh karena itu, indikator kinerja yang telah disusun melalui berbagai tahapan ini akan memacu setiap elemen di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dapat meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerjanya sehingga tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara akan berbanding lurus dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Dinas Perkebunan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>I</b>	<b>Tujuan :</b>									
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan	Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan (Persen)	-0,65	1,30	2,20	3,50	3,60	3,80	4,10	4,10
<b>II</b>	<b>Sasaran :</b>									
1	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan	1. Produksi Sawit Rakyat (Ton)	248,311	250.253	267.635	277.032	286.069	294.694	302.874	1.428.304
		2. Produksi Sawit PBS (Ton)	2.628.288	2.754.458	2.924.513	3.064.670	3.276.022	3.395.024	3.665.404	16.325.634
		3. Produksi Karet (Ton)	9,035	8.891	9.238	9.616	10.031	10.488	10.992	50.365
		4. Produksi Lada (Ton)	1,832	1.647	1.815	2.001	2.207	2.437	2.694	11.155
		5. Produksi Kelapa (Ton)	2,908	2.342	2.510	2.706	2.936	3.206	3.525	14.883
		6. Produksi Kopi (Ton)	5	6	8	14	23	40	65	151
		7. Produksi Kakao (Ton)	30	33	34	39	48	66	84	272
		8. Produksi Aren (Ton)	396	346	392	446	510	584	671	2.603
		9. Produksi Kelor (Ton)	2	3	6	8	12	13	13	51
2	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan	1. Produktivitas Sawit Rakyat (Kg/Ha)	12.992	13.200	14.067	14.510	14.931	15.327	15.698	15.698
		2. Produktivitas Sawit PBS (Kg/Ha)	16.073	16.521	17.130	17.540	18.330	18.580	19.630	19.630
		3. Produktivitas Karet (Kg/Ha)	948	911	943	978	1.017	1.059	1.106	1.106
		4. Produktivitas Lada (Kg/Ha)	588	584	639	700	768	845	929	929
		5. Produktivitas Kelapa (Kg/Ha)	512	414	441	472	509	552	603	603
		6. Produktivitas Kopi (Kg/Ha)	250	243	311	420	517	617	767	767
		7. Produktivitas Kakao (Kg/Ha)	723	656	681	718	747	806	940	940
		8. Produktivitas Aren(Kg/Ha)	2.701	2.428	2.658	2.926	3.255	3.637	4.080	4.080
		9. Produktivitas Kelor (Kg/Ha)	1.133	1.133	1.233	1.262	1.371	1.471	1.571	1.571

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3	Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun	NTP Perkebunan (Nilai)	95,44	96,00	98,00	100,00	102,00	104,00	106,00	106,00
<b>III</b>	<b>Program :</b>	<b>Indikator Program :</b>								
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	79,76	77,00	77,50	78,00	78,50	79,00	79,50	79,50
2	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Luas Areal Sawit Rakyat (Ha)	28.322	28.516	28.570	28.645	28.720	28.795	28.880	28.880
		2. Luas Areal Sawit PBS (Ha)	190.400	190.797	214.116	237.435	268.526	307.390	346.255	346.255
		3. Luas Areal Karet (Ha)	17.996	17.833	17.898	17.928	17.958	17.988	18.033	18.033
		4. Luas Areal Lada (Ha)	3.720	3.375	3.402	3.412	3.427	3.442	3.452	3.452
		5. Luas Areal Kelapa (Ha)	7.311	7.261	7.286	7.291	7.301	7.306	7.311	7.311
		6. Luas Areal Kopi (Ha)	70	72	78	89	110	115	125	125
		7. Luas Areal Kakao (Ha)	71	70	80	85	95	95	100	100
		8. Luas Areal Aren (Ha)	247	237	237	243	248	248	253	253
		9. Luas Areal Kelor (Ha)	2	2	5	7	9	9	9	9
3	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun (Meter)	-	100.000	3.600	3.600	4.000	4.000	4.800	20.0000
		2. Jumlah Embung Yang Dibangun (Unit)	-	20	3	4	4	5	4	20
4	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan (Persen)	96,67	93,33	86,67	72,00	56,00	38,67	20,00	20,00
5	Perizinan Usaha Pertanian	1. Jumlah Penerbitan STDB (Surat STDB)	0	200	200	200	200	200	200	1.000
		2. Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (Surat PUP)	30	21	11	3	20	10	3	47

**Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6	Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani (Persen)	0,53	1,91	4,77	9,76	14,63	19,62	24,60	24,60
<b>IV</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan :</b>								
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	10	9	9	9	9	9	45
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15	15	15	15	15	15	15	75
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	1	1	5
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	1	1	5
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2	2	2	2	2	2	2	10
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	7	7	7	7	7	7	35
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	-	9	-	1	-	10

**Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	12	12	12	12	12	12	60
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	54	121	104	130	130	130	130	624
10	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pertanian Yang Diawasi	-	65	409	296	220	142	182	1.249
11	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan	-	-	2	1	1	1	1	6
12	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan	-	1	2	1	2	1	2	8
13	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	-	-	21	7	7	10	5	50
14	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Luas Pengendalian OPT Dan Bencana Perkebunan	60	100	200	220	240	260	280	1.200

**Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
15	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemegang Tanda Daftar Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan Yang Dibina	180	221	211	203	220	210	203	1.047
16	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Pekebun Milenial yang dibina	15	22	47	49	48	49	48	241

Sumber Data : Hasil Analisis (2021)

## **VIII. PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 s/d 2026 merupakan upaya Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melanjutkan berbagai kebijakan pengembangan sub sektor perkebunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia.

Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 s/d 2026 memuat penyesuaian permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta implementasi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan hasil pemetaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 termasuk penyesuaian indikator, target serta pendanaan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 s/d 2026 dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 s/d 2026 disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, dokumen ini juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya setiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah (PD).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan maka Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 s/d 2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran lingkup Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara sangat diharapkan. Dengan demikian, penting bagi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengedepankan aspek perencanaan beserta fungsi pengendalian dan evaluasinya agar semua program, kegiatan, dan sub kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan waktunya.

### **Kaidah Pelaksanaan**

Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 s/d 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 s/d 2026 yang disusun melalui berbagai tahapan seperti persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Renstra, serta diakhiri dengan penetapan Renstra. Setelah RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 s/d 2026 ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2021 s/d 2026 menjadi Renstra Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 s/d 2026.

Tujuan dari setiap tahapan perencanaan tersebut adalah untuk mempertajam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 s/d 2026 sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 s/d 2026.

Setelah Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 s/d 2026 dilakukan verifikasi dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 s/d 2026, maka selanjutnya diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 s/d 2026. Kemudian Kepala Dinas Perkebunan menetapkan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 s/d 2026 sebagai pedoman unit kerja di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 s/d 2026.

Atas dasar itulah, beberapa hal perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 s/d 2026. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Perkebunan bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 s/d 2026;
2. Pejabat Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) yang merujuk berdasarkan kajian tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang terdapat di dalam Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 s/d 2026;
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 s/d 2026 dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;
4. Pelaksanaan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 s/d 2026 dilakukan melalui Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan setiap tahun melalui DPA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tiap tahun dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tiap triwulan. Hal tersebut digunakan untuk menyusun LKjIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan

## Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Perkebunan dalam mencapai sasaran Renstra Dinas Perkebunan; dan

6. Pasca pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara akan mendapatkan rekomendasi tentang pelaksanaan Renstra melalui Renja. Dengan berdasarkan rekomendasi tersebut Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menentukan untuk melanjutkan kebijakan atau harus melakukan perubahan kebijakan dan program pembangunan yang dituangkan pada Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara periode berikutnya.

Tenggarong, September 2021

Kepala Dinas,



**Ir. H. Muhammad Taufik**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670625 199203 1 007

# LAMPIRAN

**Tabel T-C.27. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan	1) Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan	3.27.01	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,00	77,50	28.167.507.862	78,00	29.717.757.862	78,50	29.744.257.862	79,00	31.128.457.862	79,50	30.989.257.862	79,50	149.747.239.309	Sekretariat	
		3.27.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	9	640.274.000	9	640.274.000	9	640.274.000	9	640.274.000	9	640.274.000	45	3.201.370.000		
		3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	3	320.898.000	3	320.898.000	3	320.898.000	3	320.898.000	3	320.898.000	15	1.604.490.000	Subbag. Peny. Program & Keuangan	Dalam dan Luar Daerah
		3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2	2	84.000.000	2	84.000.000	2	84.000.000	2	84.000.000	2	84.000.000	10	420.000.000	Subbag. Peny. Program & Keuangan	18 Kecamatan
		3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	235.376.000	4	235.376.000	4	235.376.000	4	235.376.000	4	235.376.000	20	1.176.880.000	Subbag. Peny. Program & Keuangan	Dalam dan Luar Daerah
		3.27.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akurat</b>	Laporan	15	15	23.542.202.184	15	24.126.073.862	15	24.723.573.862	15	25.339.673.862	15	25.966.263.862	75	123.697.787.631		
		3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	23.314.082.184	12	23.897.953.862	12	24.495.453.862	12	25.111.553.862	12	25.738.143.862	60	122.557.187.631	Subbag. Peny. Program & Keuangan	18 Kecamatan
		3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	15	15	228.120.000	15	228.120.000	15	228.120.000	15	228.120.000	15	228.120.000	75	1.140.600.000	Subbag. Peny. Program & Keuangan	18 Kecamatan
		3.27.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah</b>	Dokumen	1	1	121.400.000	1	131.660.000	1	131.660.000	1	131.660.000	1	131.660.000	5	648.040.000		
		3.27.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan	1	1	81.660.000	1	81.660.000	1	81.660.000	1	81.660.000	1	81.660.000	5	408.300.000	Subbag. Umum & Tatalaksana	18 Kecamatan
		3.27.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	Laporan	1	1	39.740.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	239.740.000	Subbag. Umum & Tatalaksana	18 Kecamatan
		3.27.01.2.04	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Dokumen	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	125.000.000		
		3.27.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Hasil Penjualan Tanaman Perkebunan	Rupiah	33.750.000	225.000.000	25.000.000	337.500.000	25.000.000	450.000.000	25.000.000	562.500.000	25.000.000	675.000.000	25.000.000	2.250.000.000	125.000.000	Subbag. Peny. Program & Keuangan	Tenggarong, Kembang Janggut
		3.27.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian</b>	Dokumen	2	2	253.736.200	2	537.000.000	2	270.000.000	2	537.000.000	2	270.000.000	10	1.867.736.200		
		3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Unit	-	-	-	267	267.000.000	0	-	267	267.000.000	0	-	534	534.000.000	Subbag. Kepegawaian	18 Kecamatan
		3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	21	21	183.736.200	25	200.000.000	25	200.000.000	25	200.000.000	25	200.000.000	121	983.736.200	Subbag. Kepegawaian	Dalam dan Luar Daerah
		3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	15	15	70.000.000	15	70.000.000	15	70.000.000	15	70.000.000	15	70.000.000	75	350.000.000	Subbag. Umum & Tatalaksana	Dalam dan Luar Daerah
		3.27.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Layanan	7	7	1.066.974.438	7	1.209.500.000	7	1.255.500.000	7	1.256.600.000	7	1.257.810.000	35	6.046.384.438		
		3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	6	7	10.000.000	7	10.000.000	7	11.000.000	7	12.100.000	7	13.310.000	35	56.410.000	Subbag. Umum & Tatalaksana	18 Kecamatan
		3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	26	35	300.000.000	35	350.000.000	35	385.000.000	35	385.000.000	35	385.000.000	175	1.805.000.000	Subbag. Umum & Tatalaksana	18 Kecamatan
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	5	10	26.634.438	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	50	126.634.438	Subbag. Umum & Tatalaksana	18 Kecamatan		
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1. Buku 2. Lembar 3. Buah	3	3	55.020.000	5	65.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	23	330.020.000	Subbag. Umum & Tatalaksana	18 Kecamatan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	Eksemplar	3.000	3.600	29.820.000	5.400	54.500.000	5.400	54.500.000	5.400	54.500.000	5.400	54.500.000	25.200	247.820.000	Subbag. Umum & Tatalaksana	18 Kecamatan
		3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Orang/Kali	550	460	545.500.000	500	605.000.000	500	610.000.000	500	610.000.000	500	610.000.000	2.460	2.980.500.000	Subbag. Umum & Tatalaksana	Dalam dan Luar Daerah
		3.27.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	Berkas	1.352	1.352	100.000.000	1.352	100.000.000	1.352	100.000.000	1.352	100.000.000	1.352	100.000.000	6.760	500.000.000	Subbag. Umum & Tatalaksana	18 Kecamatan
		3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	-	-	-	9	360.000.000	-	-	1	500.000.000	-	-	10	860.000.000		
		3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Diadakan	Unit	-	-	-	9	360.000.000	-	-	1	500.000.000	-	-	10	860.000.000	Subbag. Umum & Tatalaksana	Tenggarong
		3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	1.947.256.980	12	1.988.250.000	12	1.998.250.000	12	1.998.250.000	12	1.998.250.000	60	9.930.256.980		
		3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	349.006.972	12	380.000.000	12	385.000.000	12	385.000.000	12	385.000.000	60	1.884.006.972	Subbag. Umum & Tatalaksana	18 Kecamatan
		3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	80.000.000	12	90.000.000	12	95.000.000	12	95.000.000	12	95.000.000	60	455.000.000	Subbag. Umum & Tatalaksana	18 Kecamatan
		3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS 2. Jumlah pameran yang diikuti 3. Jumlah pengelolaan Website	Bulan Kali Kegiatan	12 2 1	12 2 1	1.518.250.008 - -	12 2 1	1.518.250.000 - -	12 2 1	1.518.250.000 - -	12 2 1	1.518.250.000 - -	12 2 1	1.518.250.000 - -	60 10 5	7.591.250.008 - -	Subbag. Kepegawaian	18 Kecamatan
		3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	121	104	570.664.060	130	700.000.000	130	700.000.000	130	700.000.000	130	700.000.000	624	3.370.664.060		
		3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Unit	117	103	400.000.000	127	400.000.000	127	400.000.000	127	400.000.000	127	400.000.000	611	2.000.000.000	Subbag. Umum & Tatalaksana	18 Kecamatan
		3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	1	170.664.060	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	13	1.370.664.060	Subbag. Umum & Tatalaksana	18 Kecamatan
		3.27.02	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Luas Areal Kelapa Sawit 2. Luas Areal Kelapa Sawit PBS 3. Luas Areal Karet 4. Luas Areal Lada 5. Luas Areal Kelapa Dalam 6. Luas Areal Kopi 7. Luas Areal Kakao 8. Luas Areal Aren 9. Luas Areal Kelor	Ha	28.516 190.797 17.833 3.375 7.261 72 70 237 2	28.570 214.116 17.898 3.402 7.286 78 80 237 5	4.425.000.000	28.645 237.435 17.928 3.412 7.291 89 85 243 7	3.842.250.000	28.720 268.526 17.958 3.427 7.301 110 95 248 9	3.375.750.000	28.795 307.390 17.988 3.442 7.306 115 95 248 9	2.154.050.000	28.880 346.255 18.033 3.452 7.311 125 100 253 9	2.288.250.000	28.880 346.255 18.033 3.452 7.311 125 100 253 9	16.085.300.000	1) Bidang Pengembangan & Perbenihan 2) Bidang Produksi	
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Yang Diawasi	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian Yang Diawasi	Paket	65	409	4.175.000.000	303	3.592.250.000	227	3.125.750.000	152	1.904.050.000	193	2.038.250.000	1.284	14.835.300.000		
		3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Luas pengadaan bibit & herbisida Luas pengadaan pupuk Jumlah pengadaan alat panen dan pasca panen Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapatkan Bantuan Luas pemeliharaan Kebun Dinas Jumlah pengadaan benih Luas Demfarm Tanaman Perkebunan	Ha Ha Paket Orang Ha Buah Ha	3 42 65 0 19 1.500 0	13 235 61 100 17 5.000 3	602.000.000 1.226.250.000 300.000.000 1.400.000.000 100.000.000 396.750.000 150.000.000	22 181 23 77 17 5.000 3	706.500.000 889.000.000 200.000.000 1.200.000.000 100.000.000 396.750.000 100.000.000	37 54 61 75 17 5.000 3	953.000.000 261.500.000 314.500.000 1.000.000.000 100.000.000 396.750.000 100.000.000	10 52 26 64 17 5.000 4	176.500.000 251.500.000 79.300.000 800.000.000 100.000.000 396.750.000 100.000.000	10 76 62 45 17 5.000 4	176.500.000 358.000.000 307.000.000 600.000.000 100.000.000 396.750.000 100.000.000	92 598 233 361 17 25.000 4	2.614.500.000 2.986.250.000 1.200.800.000 5.000.000.000 500.000.000 1.983.750.000 550.000.000	1) Seksi Peng. Areal 2) Seksi Sarana & Prasarana 3) Seksi Alat & Mesin	Kembang Janggut, Kenohan, Tabang, Marang Kayu, Muara Badak, Anggana, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai, Muara Jawa, Samboja, Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong, Sebulu, Muara Kaman, Sanga-sanga
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan	Komoditi	-	2	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	6	1.250.000.000		
		3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan	Komoditi	-	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	5	625.000.000	Seksi Perbenihan	Kembang Janggut, Kenohan, Loa Kulu, Loa Janan, Samboja, Muara Jawa, Muara Badak, Marang Kayu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
	Tanaman	3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Fasilitas Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Fasilitas	0	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	5	625.000.000	Seksi Perbenihan	Kembang Janggut, Kenohan, Loa Kulu, Loa Janan, Samboja, Muara Jawa, Muara Badak, Marang Kayu
		3.27.03	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	Meter	100.000	3.600	3.315.000.000	3.600	2.347.500.000	4.000	2.737.500.000	4.000	2.625.000.000	4.800	2.680.000.000	20.000	13.705.000.000	1) Bidang Pengembangan & Perbenihan 2) Bidang Produksi	
				2. Jumlah Embung Yang Dibangun	Unit	20	3		4		4		5		4		20			
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan	Dokumen	1	2	350.000.000	1	150.000.000	2	300.000.000	1	150.000.000	2	300.000.000	8	1.250.000.000		
		3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	Dokumen	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	750.000.000	Seksi Penyiapan & Pemanfaatan Lahan	18 Kecamatan
		3.27.03.2.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Lahan	Dokumen	-	1	200.000.000	-	-	1	150.000.000	-	-	1	150.000.000	3	500.000.000	Seksi Penyiapan & Pemanfaatan Lahan	18 Kecamatan
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	Unit	-	21	2.965.000.000	7	2.197.500.000	7	2.437.500.000	10	2.475.000.000	5	2.380.000.000	50	12.455.000.000		
		3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Panjang Parit Kebun Yang Direhabilitasi	Meter	-	-	-	1.000	100.000.000	1.000	100.000.000	1.000	100.000.000	1.000	100.000.000	4.000	400.000.000	Seksi Sarana & Prasarana	Muara Jawa, Samboja
		3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Yang Dibangun	Unit	20	3	1.500.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	5	1.000.000.000	4	500.000.000	20	5.000.000.000	Seksi Sarana & Prasarana	Marang Kayu, Muara Badak, Samboja, Loa Janan, Tenggarong, Sebulu, Muara Kaman, Muara Muntai
		3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	Meter	100.000	3.600	1.180.000.000	3.600	960.000.000	4.000	1.200.000.000	4.000	1.200.000.000	4.800	1.680.000.000	20.000	6.220.000.000	Seksi Sarana & Prasarana	Marang Kayu, Muara Badak, Anggana, Muara Jawa, Samboja, Loa Janan, Sebulu, Muara Kaman, Muara Muntai, Kembang Janggut, Kenohan
3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Kebun Yang Direhabilitasi	Unit	-	17	285.000.000	2	37.500.000	2	37.500.000	4	75.000.000	-	-	25	435.000.000	Seksi Sarana & Prasarana	Muara Jawa, Samboja		
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Unit Pengolah Hasil	Unit	-	1	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	400.000.000	Seksi Sarana & Prasarana	Kenohan, Loa Kulu, Samboja, Marang Kayu		
2) Meningkatkan Produktivitas Komoditas Perkebunan		3.27.05	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan	Persen	93,33	86,67	450.000.000	72,00	450.000.000	56,00	450.000.000	38,67	450.000.000	20,00	450.000.000	20,00	2.250.000.000	Bidang Perlindungan	
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Pengendalian OPT Dan Bencana Perkebunan	Ha	100	200	450.000.000	220	450.000.000	240	450.000.000	260	450.000.000	280	450.000.000	1.200	2.250.000.000		
		3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas pengendalian OPT Perkebunan	Ha	40	60	150.000.000	110	150.000.000	120	150.000.000	130	150.000.000	140	150.000.000	560	750.000.000	Seksi Pengamatan & Peng. OPT	18 Kecamatan
		3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ANKT) dalam areal IUP Perkebunan yang dikelola	Ha	21.550	22.050	150.000.000	22.650	150.000.000	23.200	150.000.000	23.800	150.000.000	24.200	150.000.000	24.200	750.000.000	Seksi Pengendalian Lingkungan	18 Kecamatan
		3.27.05.2.01.03	Prevensi, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1. Jumlah Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina 2. Jumlah Gangguan Usaha Perkebunan yang difasilitasi	Kelompok Kasus	10 10	10 10	150.000.000 10	15 10	150.000.000 10	15 10	150.000.000 10	20 10	150.000.000 10	20 10	150.000.000 10	80 50	750.000.000 50	Seksi Pengendalian Lingkungan	18 Kecamatan
		3.27.06	Perizinan Usaha Pertanian	1. Jumlah Penerbitan STDB	Surat (STDB)	200	200	400.000.000	200	250.000.000	200	300.000.000	200	250.000.000	200	250.000.000	1.000	1.450.000.000	Bidang Usaha & Penyuluhan	
				2. Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	Surat (PUP)	21	11		3		20		10		3		47			
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Perkebunan Yang Dibina Kabupaten/Kota	Jumlah Pemegang Tanda Daftar Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan Yang Dibina	Pelaku	221	211	400.000.000	203	250.000.000	220	300.000.000	210	250.000.000	203	250.000.000	1.047	1.450.000.000				
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	1. Jumlah pekebun yang mendapatkan STDB	Surat (STDB)	200	200	400.000.000	200	250.000.000	200	300.000.000	200	250.000.000	200	250.000.000	1.000	1.450.000.000	Seksi Pembinaan & Gangguan Usaha	18 Kecamatan		
		2. Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	Surat (PUP)	21	11		3		20		10		3		47					
3) Meningkatkan Kesejahteraan Pekebun		3.27.07	Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaihan Kelas Kelompok Tani	Persen	1,91	4,77	500.000.000	9,76	650.000.000	14,63	650.000.000	19,62	650.000.000	24,60	600.000.000	24,60	3.050.000.000	Bidang Usaha & Penyuluhan	
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Pekebun Milenial yang dibina	Lembaga	22	47	500.000.000	49	650.000.000	48	650.000.000	49	650.000.000	48	600.000.000	241	3.050.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1. Jumlah Kelompok Tani yang dibina 2. Jumlah Pekebun Milenial yang dibina	Kelompok Orang	18 0	45 10	350.000.000	47 20	400.000.000	46 30	400.000.000	47 40	400.000.000	47 50	400.000.000	232 150	1.950.000.000	Seksi Penyuluhan	18 Kecamatan
		3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Lembaga Pekebun yang Dibentuk/Bermitra	Lembaga	4	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	1	150.000.000	9	750.000.000	Seksi Pengolahan & Pem. Hasil	Marang Kayu, Muara Badak, Samboja, Loa Kulu, Kota Bangun, Kembang Janggut
		3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Pekebun Peserta Pelatihan Budidaya, Panen/Pasca Panen	Orang	-	-	-	40	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	20	50.000.000	140	350.000.000	Seksi Teknologi & Budidaya	Marang Kayu, Muara Badak, Muara Jawa, Samboja, Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong, Sebulu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kembang Janggut, Kenohan, Tabang
<b>Jumlah</b>								<b>37.257.507.862</b>		<b>37.257.507.862</b>		<b>37.257.507.862</b>		<b>37.257.507.862</b>		<b>37.257.507.862</b>		<b>186.287.539.309</b>		

Tenggarong, September 2021

Kepala Dinas Perkebunan  
Kabupaten Kutai Kartanegara,



**Ir. Muhamad Taufik**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196706251992031007